

SKRIPSI

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE**



OLEH

**SASKIA AULIYAH YUSRI
NIM:2020203862202047**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE**



OLEH

**SASKIA AULIYAH YUSRI
NIM:2020203862202047**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada
Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Akuntansi**

**Program Studi
Akuntansi Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**SASKIA AULIYAH YUSRI
NIM:2020203862202047**

Kepada

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Saskia Auliyah Yusri

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203862202047

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.5118/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Damirah, S.E, M.M

NIP : 19760604 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E.,
M.Ak., CTA., ACPA

NIP : 2003029203

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdakhirah Muhammadun, M.Ag.
NIP 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Pada Kantor Kementerian Agama Kota
Parepare

Nama Mahasiswa : Saskia Auliyah Yusri

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203862202047

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.5118/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2023

Tanggal Kelulusan : 30 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Damirah, S.E, M.M.	(Ketua)	(.....)
Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., CTA., ACPA	(Sekertaris)	(.....)
Abdul Hamid, S.E., M.M	(Anggota)	(.....)
Indrayani, S.E., M.Ak.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP.19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare”. Salam dan Salawat penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai pemberi petunjuk jalan yang lurus. Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Kedua orang tua dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan Ibu Dr. Damirah, S.E, M.M selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., CTA., ACPA atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih:

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof, Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi pada

- Fakultas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
 5. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
 6. Kedua orang tua, Ayah Yusri yunus, S.KM terima kasih untuk hari-hari singkat yang telah kau habiskan untuk menjaga, menyayangi, mendidik, dan membimbing serta selalu mendoakan penulis, Ibu Gusriani dollah, S.E terima kasih untuk support, kerja keras dan pengorbanannya selama menjalani proses studi di IAIN Parepare. Gelar sarjana ini penulis persembahkan untuk kalian. parafrase kalimat diatas jadi lebih sempurna dan bagus
 7. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada keluarga besar, terutama Nenek Hj. Asihi, Tante P. Iccang, Tante P. Erna, dan saudara saya Muh. Fitrah ramdhani atas dukungan yang tak pernah putus kepada penulis selama ini.
 8. Kepada sahabat-sahabat terdekat, Puji Purnamasari, Suci Ramadhani, Tri Resky Aulia, Putri Ramadhani, dan Dhela Isnin, terima kasih atas kesetiaan kalian menemani dan menjadi pendengar setia dalam perjalanan penulis hingga semester akhir.
 9. Untuk teman-teman seperjuangan di kampus, Uswatun Hasanah, S.Akun dan Riska Rahmayanti, S.Akun terima kasih atas kebersamaan dan solidaritas yang telah kita jalin dari awal hingga akhir masa perkuliahan.

10. Untuk rekan-rekan KKN serta Ibu dan Bapak posko Desa Salo Dua, Terima kasih atas kebersamaan dan dukungan selama pengabdian. Pengalaman bersama kalian telah memberikan perjalanan akademik saya dalam menyelesaikan mata kuliah ini.

11. Kepada Sri Wahyuni dan Anggun Faradilva, saya ucapkan terima kasih yang mendalam atas semangat dan motivasi yang selalu kalian berikan, mendorong penulis untuk terus bangkit dan menghadapi setiap tantangan hidup dengan tegar.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 14 Juli 2024

8 Muharram 1446 H

Penyusun


Saskia Auliyah Yusri
NIM. 2020203862202047

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saskia Auliyah Yusri
NIM : 2020203862202047
Tempat/Tanggal Lahir : 07 Juni 2002
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 14 Juli 2024
Penyusun


Saskia Auliyah Yusri
NIM. 2020203862202047

ABSTRAK

Saskia Auliyah Yusri, *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.* (Dibimbing oleh Damirah dan Andi Ayu Frihatni)

Penerapan akuntansi berbasis aplikasi Sakti menjadi salah satu hambatan yang dirasakan oleh pegawai dengan minimnya kompetensi dalam mengadopsi perkembangan teknologi membuat kualitas laporan keuangan yang kurang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare dan untuk mengetahui seberapa baik standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan instrument penelitian yaitu kuesioner yang diberikan kepada 36 pegawai kantor kantor kementerian agama Kota Parepare dengan teknik analisis data menggunakan uji regresi linier sederhana.

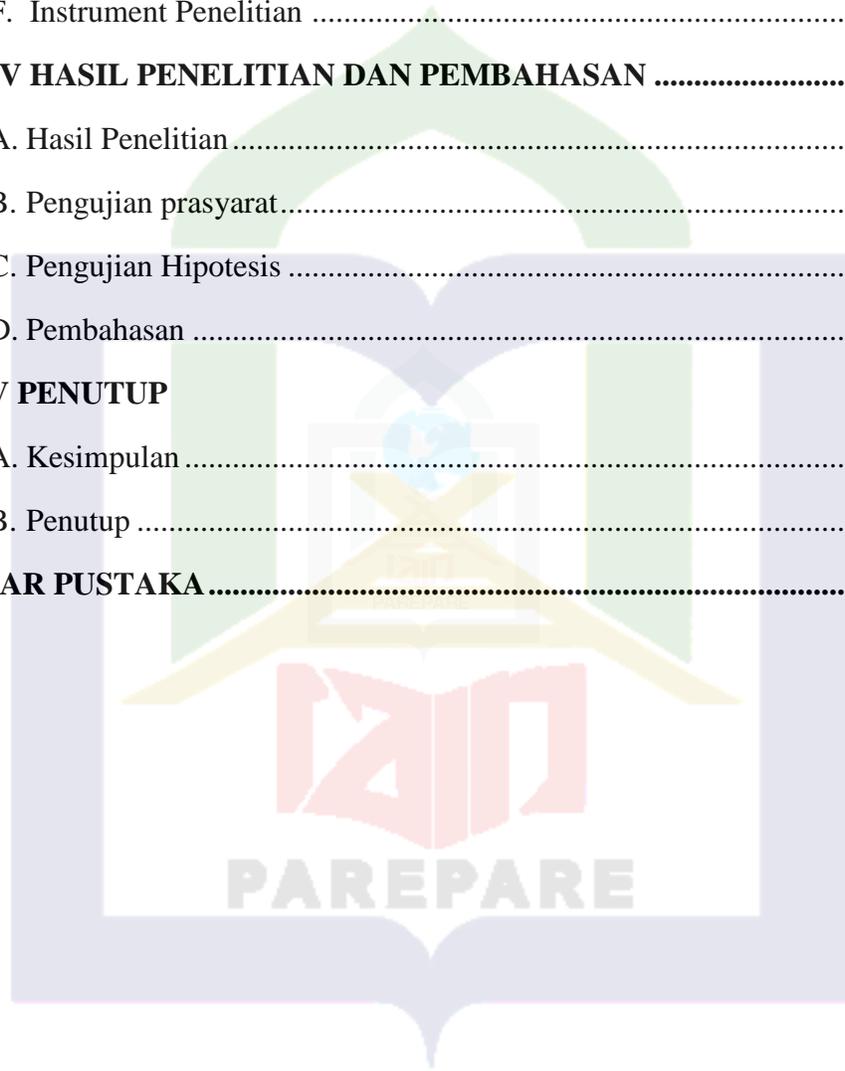
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare dengan nilai significant sebesar $0.000 < 0.005$ sehingga hipotesis (H_1) diterima yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama kota Parepare. Standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare dikategorikan cukup baik dengan nilai $t_{hitung} 46.460 > t_{tabel} 1.690$ maka H_2 diterima yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah lebih besar dari 75% dapat diterima dengan kualitas laporan keuangan lebih besar dari yang dihipotesiskan (μ_0) dengan kategori cukup baik. Interpretasi hasil penelitian yaitu semakin baik kualitas penerapan standar akuntansi pemerintahan maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian agama Kota Parepare.

Kata kunci: Penerapan standar akuntansi, kualitas laporan keuangan, pengaruh

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
PEDOMAN LITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu	13
B. Tinjauan Teoritis.....	18
C. Kerangka pikir	39
D. Hipotesis	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	43

C. Populasi dan Sampel	44
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Definisi Operasional Variabel	46
F. Instrument Penelitian	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Hasil Penelitian	57
B. Pengujian prasyarat	66
C. Pengujian Hipotesis	68
D. Pembahasan	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Penutup	76
DAFTAR PUSTAKA	I



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 3.1	Skala Likert	49
Tabel 4.1	Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin	57
Tabel 4.2	Data Responden berdasarkan Pendidikan	58
Tabel 4.3	Data Responden berdasarkan Umur	59
Tabel 4.4	Data Responden berdasarkan Lama Bekerja	60
Tabel 4.5	Hasil Uji Statistik Deskriptif	61
Tabel 4.6	Hasil Uji Statistik Deskriptif	64
Tabel 4.7	Uji Normalitas	66
Tabel 4.8	Uji heteroskedastisitas	67

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.2	Kerangka Pikir	34



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran
1	Pedoman Penelitian
2	Surat Izin Penelitian
3	Surat Melaksanakan Penelitian
4	Surat Keterangan Selasai Meneliti
5	Dokumentasi
6	Biografi Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	ء	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fʿala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbiḷ ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- اللهُ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamīan/Lillāhil-amru jamīan

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	=	<i>subhānahu wata'ālā</i>
saw.	=	<i>Shallallahu 'Alaihi wa Sallam'</i>
a.s.	=	<i>alaihis salam</i>
H	=	<i>Hijriah</i>
M	=	<i>Masehi</i>
SM	=	<i>Sebelum Masehi</i>
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sektor publik di Indonesia sekarang ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik baik di pusat maupun di daerah, akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, hal tersebut menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap layanan publik yang baik telah mendorong pemerintah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu perubahan yang diinginkan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan, karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan¹. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2006, tentang laporan keuangan

¹ Siti Afifah, Fadli Fadli, and Baihaqi Baihaqi, 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Dan Peran

menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama satu periode. Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Menurut PP No 71 Tahun 2010 yang menggunakan laporan keuangan pemerintahan yaitu: masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, mereka yang berperan atau memberi dalam suatu tahapan investasi, pinjaman dan donasi, investasi, serta pihak pemerintah. PP No 71 Tahun 2010 mengatakan kualitas karakteristik suatu laporan keuangan pemerintah yaitu suatu prasyarat normatif yang sangat dibutuhkan sehingga laporan keuangan pemerintahan bisa memberikan kualitas yang diinginkan, yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam proses mengelola keuangan daerah yang ada dalam suatu instansi haruslah disusun dengan semaksimal mungkin agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif².

Menciptakan tata kelola yang baik (*Good Governance*), pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah

Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah', *Jurnal Fairness*, 8.2 (2021), 141–52 <<https://doi.org/10.33369/fairness.v8i2.15203>>.

² Tri Ikyarti and Nila Aprila, 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma', *Jurnal Akuntansi*, 9.2 (2019), 131–40.

daerah.

Pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan³.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Negara merupakan pedoman utama bagi instansi pemerintah dalam menyajikan, menyusun, dan melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. standar akuntansi pemerintahan merupakan landasan hukum bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengendalikan penerimaan dan pengeluaran dana dalam anggaran serta pelaksanaannya secara transparan, bersih, efisien dan akuntabel, serta digunakan untuk mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan⁴.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual mulai diterapkan pada tahun 2015 oleh Pemerintah Daerah diseluruh Indonesia. Hal tersebut memberi kemajuan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang lebih efektif dan

³ Harry Aprsiansyah, Sri Rahayu, and Misni Erwati, 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo', *Jambi Accounting Review (JAR)*, 1.1 (2020), 44–62.

⁴ Devi Roviyantie, 'Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah', *Universitas Siliwangi*, 2011.

transparan. Diterapkannya akuntansi basis akrual tersebut dianggap lebih baik daripada menggunakan basis kas, hal ini dikarenakan akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih lebih akurat, komprehensif, relevan, dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan ekonomi, politik dan sosial⁵.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah⁶. Pelaporan keuangan yang dihasilkan dari laporan tersebut berkualitas karena memenuhi standar peraturan yang berlaku. Standar akuntansi merupakan bahan acuan penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi. Standar akuntansi membantu membuat laporan keuangan yang menentukan informasi apa yang harus disajikan kepada pihak luar organisasi. Pengguna laporan keuangan di luar organisasi akan dapat memahami informasi yang disajikan jika diterapkan pada standar dan persepsi yang dipahami sama dengan pembuat laporan keuangan⁷.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sangat penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, keberhasilan atau kegagalan penerapannya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdapat dalam

⁵ Siti Musaropah, 'Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pp 71 Tahun 2010 Pada Bpkad Kabupaten Kuningan' (S1 Akuntansi Syariah Iain Syekh Nurjati, 2023).

⁶ Devi Edriani, 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Sekretaris Dewan Kota Padang', *UNES Journal Of Social and Economics Research*, 2.1 (2017), 31–41.

⁷ Abdul Halim and Muhammad Syam Kusufi, 'Akuntansi Sektor Publik', *Jakarta: Salemba Empat*, 2012.

satuan kerja pemerintah itu sendiri. Dari penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang meliputi kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi⁸. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi akuntansi berbasis akrual pada pemerintah tidak hanya bergantung pada standar itu sendiri, tetapi juga pada kesiapan dan kapasitas satuan kerja pemerintah yang menerapkannya, yang salah satunya sangat berpengaruh yaitu kompetensi sumber daya manusia.

Menurut Bintoro dan Daryanto menyatakan sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal⁹. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif pada penerapan standar akuntansi berbasis akrual. Hal ini disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mengimplementasikan Penerapan standar akuntansi pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar yang berlaku¹⁰.

Penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya tidak bisa lepas dari penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan adanya dasar peraturan tentang standar akuntansi pemerintah sehingga dapat diterapkan dan dijadikan landasan dalam penyusunan laporan keuangan akan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Akan tetapi hal tersebut juga

⁸ Victor Pattiasina and Muhamad Yamin Noch, 'Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Ditinjau Dari Sisi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern', *AccJu-Accounting Journal*, 1.01 (2019), 18–28.

⁹ Bintoro dan Daryanto, *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan* (Yogyakarta: Gava Media, 2017).

¹⁰ Eriza Khosakiyah, Vhika Meiriasari, and Andini Utari Putri, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Selatan', *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*, 1.1 (2020), 11–22.

tidak dapat terlepas dari sumber daya manusia yang ada. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan operasional tentang pemerintahan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa peran sumber daya manusia yang berkualitas akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas juga¹¹.

Faktor sumber daya manusia yang berpengaruh, keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual dan kualitas informasi yang tersaji pada laporan keuangan Instansi pemerintah juga dipengaruhi oleh tingkat pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi digunakan sebagai metode untuk menyajikan informasi yang berkualitas tinggi, relevan, efektif dan efisien, yang digunakan baik untuk keperluan individu, perusahaan maupun pemerintah dan merupakan informasi strategis dalam pengambilan keputusan. Teknologi informasi memanfaatkan sekumpulan komputer untuk proses pengolahan data, sistem jaringan menghubungkan antar komputer sesuai kepentingan, dan menggunakan teknologi telekomunikasi agar informasi dapat disebarluaskan dan diakses dalam skala global.

Pemanfaatan teknologi informasi pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Laju perkembangan teknologi informasi saat ini sangat cepat, sehingga diharapkan dengan adanya teknologi informasi ini pemerintah dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memperbaiki kualitas informasi keuangan

¹¹ Alisha Ristanti Hermawan, 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Sumber Daya Manusiaterhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Periode 2017-2020', *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2.2 (2022), 304–15.

daerah yang diberikan kepada masyarakat. Teknologi informasi akan sangat berkontribusi dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, banyaknya jumlah transaksi jika dilakukan secara manual akan meningkatkan risiko terjadinya kesalahan pencatatan¹². Oleh karena itu, penggunaan teknologi informasi yang tepat akan mendukung pemerintah dalam memproses transaksi keuangan dengan efektif dan efisien dalam penyusunan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Niagawan menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual¹³.

Argumentasinya opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merpresentasikan kesesuaian kualitas laporan keuangan pemerintah dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Semakin kecil kesalahan penyajian dan ketidaksesuaian dengan SAP, laporan keuangan pemerintah daerah semakin berkualitas. Berdasarkan tingkat kesesuaian laporan keuangan dengan SAP, opini BPK dibedakan menjadi lima, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Laporan keuangan yang memperoleh opini WTP merepresentasikan laporan keuangan paling berkualitas, berturut-turut diikuti dengan opini WTP-DPP, opini WDP, opini TW, dan TMP¹⁴.

¹² Galan Nur Subhi and Indrawati Yuhertiana, 'Peran SDM Dan Teknologi Informasi Pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual', *Equity*, 24.2 (2021), 141–56.

¹³ Komang Adhi Rivian Niagawan, Ni Putu Yeni Yuliantari, and Ni Putu Trisna Windika Pratiwi, 'Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, Dan Kualitas Teknologi Informasi Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual', *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1.2 (2020), 130–59.

¹⁴ Budhi Purwantoro Jati, 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah', *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 22.1 (2019), 1–14.

Kantor Kementerian Agama Kota Parepare sebagai Instansi Pemerintah dituntut untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Kualitas laporan keuangan sangat penting karena dapat mempengaruhi kepercayaan pihak terkait seperti pemangku kepentingan, investor, dan masyarakat umum. Pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, laporan keuangan yang berkualitas merupakan cerminan dari transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana negara dalam pelaksanaan program-program keagamaan. Pada tahun 2019 sampai tahun 2022 Kementerian Agama Kota Parepare mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Meskipun mendapat opini WTP, Kementerian Agama Kota Parepare masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas untuk menjamin kualitas laporan keuangan yang berkelanjutan.

Pengamatan awal di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare telah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai pembinaan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan menggunakan aplikasi akuntansi sejak tahun 2019 hingga saat ini. Pada tahun 2019, Kementerian Agama menggunakan aplikasi offline yaitu SAIBA (Sistem Akuntansi Institusi Berbasis Akrual) yang digunakan dari tahun 2019 sampai 2021. Kemudian sejak tahun 2021 hingga sekarang, Kantor Kementerian Agama Kota Parepare beralih menggunakan aplikasi online yaitu SAKTI (Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi) untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan.

Observasi awal yang dilakukan, ditemukan bahwa terdapat kendala dalam sumber daya manusia (SDM) yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan aplikasi Sakti. Salah satu kendala sumber daya manusia yang dihadapi adalah

minimnya kompetensi pegawai dalam mengadopsi perkembangan teknologi terkini untuk mengoperasikan aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Aplikasi SAKTI ini senantiasa diperbarui secara berkala untuk mengakomodasi perubahan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas pegawai agar mampu mengikuti pemutakhiran aplikasi SAKTI guna memastikan kepatuhan terhadap SAP dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

Kementerian Agama Kota Parepare juga pernah mengalami situasi di mana terjadi mutasi pegawai secara menyeluruh. Dalam proses mutasi tersebut, terdapat beberapa pegawai yang sebelumnya tidak bertugas di bagian keuangan, namun kemudian ditempatkan di bagian keuangan. Pegawai-pegawai tersebut jelas belum memiliki pemahaman mendalam tentang sistem atau mekanisme penyusunan laporan keuangan. Idealnya, pegawai yang ditempatkan di bagian keuangan seharusnya memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman yang relevan dengan pengelolaan laporan keuangan, karena bidang keuangan membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang hanya dapat diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman kerja yang terkait. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi di bidang keuangan dapat menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan tugas penyusunan laporan keuangan secara optimal, dikarenakan kurangnya pemahaman tentang konsep-konsep akuntansi, standar pelaporan keuangan, peraturan perpajakan, serta kemampuan analisis dan interpretasi data keuangan yang diperlukan untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan.

Mengingat pentingnya laporan keuangan yang berkualitas sebagai cerminan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana negara, serta tantangan yang dihadapi

Kementerian Agama Kota Parepare dalam pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten untuk menjamin kualitas laporan keuangan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan mengidentifikasi beberapa faktor-faktor penerapan standar akuntansi pemerintahan yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Sehingga, hasilnya dapat digunakan untuk merumuskan strategi dalam meningkatkan kapasitas pegawai dan memastikan kepatuhan terhadap SAP, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana negara dalam program-program keagamaan di Kementerian Agama Kota Parepare. Mendasar pada penjelasan diatas penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare?
- 2) Seberapa baik standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor kementerian agama kota parepare

- 2) Untuk mengetahui seberapa baik standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor kementerian agama kota parepare

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada khalayak baik teoritis maupun praktis. Penelitian ini di harapkan agar dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi serta memperluas wawasan terkait konsep dasar standar akuntansi pemerintahan dan teori akuntansi sektor publik yang relevan. sehingga dapat membantu dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang terkhusus tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Kegunaan Praktis

- a) Kegunaan bagi Kantor Kementerian Agama Kota Parepare

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi alat evaluasi kinerja bagi kantor Kementerian Agama Kota Parepare dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan penerapan standar akuntansi pemerintahan, sehingga dapat memenuhi tuntutan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

- b) Kegunaan bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan ilmu

pengetahuan tentang pentingnya diterapkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai suatu standar peraturan dalam penyajian laporan keuangan. Serta, ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada instansi pemerintah lainnya.

c) Kegunaan bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintahan. Melalui evaluasi terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan, masyarakat dapat memahami secara lebih baik bagaimana dana publik dikelola dan diinvestasikan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan hasil penelitian¹⁵. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya mengenai standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan adalah:

1. Penelitian Purwanti Nurcahyani pada tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul, Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris SKPD) Kabupaten Klaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan, sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Klaten. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan sistem akuntansi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

¹⁵ Masyhuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian* (Jakarta: Revika Aditama, 2008), p. 135.

pemerintah daerah¹⁶.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu dengan penelitian ini meneliti tentang penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan, perbedaan utama antara penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada variabel yang diteliti. Penelitian sebelumnya melibatkan empat variabel, yaitu pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut berfokus pada studi empiris di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Sedangkan, penelitian ini hanya memfokuskan pada satu variabel, yaitu pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.

2. Penelitian Siska pada tahun 2017 dalam penelitiannya yang berjudul, Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh efektivitas terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Wilayah Kementrian Agama Sulsel. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian yang telah

¹⁶ Nurcahyani Purwanti, 'Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris SKPD Kabupaten Klaten)' (Universitas Widya Dharma Klaten, 2020).

dilakukan terkait pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah menunjukkan bahwa Thitung 33,968 dengan nilai signifikansi $0,021 < 0,05$ dan hasil uji regresi menunjukkan nilai koefisien 0,930 menunjukkan bahwa variabel efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah¹⁷.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu dengan penelitian ini meneliti tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu meneliti di kantor kementerian agama sulawesi selatan sedangkan penelitian ini meneliti di kantor kementerian agama kota parepare.

3. Penelitian Fatmawati pada tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul, Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, kompetensi SDM dan Teknologi Informasi secara parsial dan simultan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan di Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan (1) terdapat pengaruh

¹⁷ Siska, 'Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan', 2017.

positif dan signifikan Implementasi SAP, Kompetensi sumber daya manusia, dan Informasi Teknologi secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel implementasi SAP, kompetensi sumber daya manusia dan teknologi informasi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan di Kabupaten Bulukumba (2) variabel yang paling berpengaruh (dominan) yaitu variabel kompetensi sumber daya manusia dengan nilai koefisien determinasi sebesar 73,9¹⁸.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu dengan penelitian ini meneliti tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu berfokus meneliti di Pemerintahan di Kabupaten Bulukumba. Sedangkan penelitian ini berfokus meneliti di kantor kementerian agama kota Parepare.

4. Penelitian Ade Luthfy pada tahun 2023 dalam penelitiannya yang berjudul, Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Tujuan penelitian ini untuk menguji dan memperoleh bukti empiris terhadap Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal dan

¹⁸ Fatmawati Fatmawati, 'Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kabupaten Bulukumba' (STIE Nobel Indonesia, 2020).

Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh. Komitmen Organisasi mampu memoderasi pengaruh antara sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan komitmen organisasi tidak mampu memoderasi pengaruh antara standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan¹⁹.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu dengan penelitian ini meneliti tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu bahwa penelitian terdahulu memiliki 4 variabel dan menggunakan teknik Purposive Sampling sedangkan penelitian sekarang memiliki 2 variabel dan menggunakan teknik sampling jenuh .

5. Penelitian Asep Mulyadi Hadori pada tahun 2022 dalam penelitiannya yang berjudul, Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas

¹⁹ Ade Luthfya, 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi' (Universitas Jambi, 2023).

Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan²⁰.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu dengan penelitian ini meneliti tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sedangkan, Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini dalam hal lokus penelitian dan teknik pengambilan sampel yang digunakan. Penelitian sebelumnya berfokus pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dalam memilih sampel penelitian. Sedangkan, penelitian ini mengambil sampel dengan menggunakan teknik sampel jenuh dan berfokus pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.

²⁰ Asep Mulyadi Hadori, 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat' (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stan – Indonesia Mandiri Bandung, 2022).

B. Tinjauan Teori

1. Teori *Entity*

Menurut teori entitas (*Entity Theory*), organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan ekonomi yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana ke dalam organisasi²¹. Dengan demikian organisasi menjadi kesatuan pelapor (*Reporting Entity*) yang bertanggung jawab kepada pemilik. Media pertanggungjawaban yang digunakan adalah laporan keuangan. Implikasinya, laporan keuangan entitas dianggap sebagai pengganti kepemilikan, karena sistem pengendalian dan pengelolaan terhadap modal terpisah dari pemilik²². Dengan demikian, laporan keuangan menjadi dasar penilaian atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya suatu entitas. Dalam konteks pertanggungjawaban, audit menjadi suatu kebutuhan dan penting ketika pemilik sumber daya mempekerjakan pihak lain untuk mengelola sumber daya mereka.

Pada konteks sektor publik, unit pemerintahan merupakan entitas yang wajib melakukan pencatatan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Tujuan utama pelaporan keuangan sektor publik adalah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang diamanatkan kepada pemerintah sebagai entitas sektor publik dan untuk menyediakan

²¹ Teori Akuntansi Suwardjono, 'Perekayasaan Pelaporan Keuangan', Yogyakarta: Bpfe, 2005.

²² FASB IASB, 'EXPOSURE DRAFT: Conceptual Framework for Financial Reporting: The Objective of Financial Reporting and Qualitative Characteristics and Constraints of Decision Useful Financial Reporting Information', 2008.

informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Agar memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi, laporan keuangan pemerintah harus disampaikan tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Untuk memberikan jaminan bahwa laporan keuangan pemerintah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan tersebut harus diperiksa oleh pihak eksternal yang independen. Hal ini disebabkan karena audit eksternal memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan mendukung pelaporan keuangan yang transparan²³.

2. Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Teori yang mendasari dalam penelitian ini adalah teori stakeholder. Teori stakeholder merupakan teori yang menyatakan bahwa entitas tidak hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus mampu memberikan manfaat dan juga sangat dipengaruhi oleh dukungan stakeholder-nya²⁴.

Pada prinsipnya *Stakeholder theory* menyatakan perusahaan atau organisasi bisnis harus memperhatikan kepentingan, kebutuhan, dan pengaruh dari orang-orang atau kelompok yang berperan dalam hal mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan dan operasional²⁵. Namun teori ini dapat diterapkan dalam sudut pandang pemerintahan atau sektor publik, dimana dalam konteks keputusan manajerial pemerintah juga harus mempertimbangkan kepentingan stakeholder. Para stakeholder tersebut bukan

²³ Philip D Palmer, 'Audit Quality and Financial Report Disclosure', *Flinders Business School Research Paper Series*, 1 (2008), 1–29.

²⁴ Anis Chariri and Imam Ghozali, 'Teori Akuntansi', *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*, 409 (2007).

²⁵ Emerson Wagner Mainardes, Helena Alves, and Mario Raposo, 'Stakeholder Theory: Issues to Resolve', *Management Decision*, 49.2 (2011), 226–52.

hanya terdiri atas masyarakat dan anggota legislatif, namun juga para pegawai dalam organisasi sektor publik sebagai pihak eksekutif, para kreditor dan investor.

Entitas yang ditujukan pada penelitian ini adalah pemerintah yang harus menyajikan laporan keuangan berkualitas sehingga bermanfaat bagi stakeholder dalam pengambilan keputusan. Adanya teori stakeholder mengharuskan pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya tersebut guna tercapainya kepentingan stakeholder, selain itu teori ini dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik karena adanya komitmen yang dipegang oleh pemerintah terhadap stakeholdernya. Penyajian dan kinerja keuangan pemerintah dapat tercermin melalui laporan keuangan yang disajikan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan adanya kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dari entitas tersebut. Kompetensi sumber daya manusia yang dimaksud adalah kemampuan orang-orang yang terlibat di dalam proses pembuatan laporan keuangan. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berbicara mengenai proses pembuatan laporan keuangan hingga pelaporan berupa penyampaian kepada para stakeholder. Ketika kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasinya baik maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dimana laporan keuangan tersebut memiliki manfaat ekonomi bagi para stakeholder.

3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

a. Definisi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pertama kali diterapkan di

Indonesia pada tahun 2005 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelumnya, pada tahun 1971, ditemukan undang-undang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara yaitu UU No.11 Tahun 1971 tentang Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah. Pada tahun 2010, SAP diperbarui dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengharuskan pemerintah pusat dan daerah menerapkan akuntansi akrual (*Full Accrual*)²⁶.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Adapun Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Indra Bastian, yaitu:

“Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia”²⁷.

Standar akuntansi adalah seperangkat aturan, prinsip, dan pedoman yang digunakan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan

²⁶ Rizki Puspita Sari, ‘Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap) Dalam Laporan Keuangan Tahunan Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih’, 2018, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) Dal.

²⁷ Sanusi Ariyanto, ‘Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2018’, *Valuta*, 6.1 (2020), 41–54.

pengungkapan informasi keuangan suatu entitas. Tujuan dari standar akuntansi adalah untuk menciptakan keseragaman, konsistensi, transparansi, dan keandalan dalam penyusunan dan pelaporan informasi keuangan. Oleh karena itu, mekanisme penyusunan standar akuntansi harus diatur sedemikian rupa, sehingga memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan.

Standar akuntansi mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi (*Standard Setting Body*) pada saat tertentu. Standar ini merupakan konsensus/kesepakatan bersama yang berisi tentang pengukuran, pengakuan penilaian, pengungkapan sumber-sumber ekonomi, kewajiban, modal, hasil, biaya, dan perubahannya ke dalam bentuk laporan keuangan. Dalam standar ini dijelaskan transaksi apa yang harus diukur, dinilai dan bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan yang akan disajikan. Adapun sejumlah pertimbangan dalam penetapan standar yang harus diperhatikan, antara lain :

- 1) Standar menyajikan kumpulan data bagi pemerintah tentang berbagai variabel yang perlu dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi perusahaan, perencanaan serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi, serta tujuan sosial lainnya.
- 2) Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, penyebaran standar akan menghasilkan banyak kontroversi dan perdebatan, baik dalam lingkungan praktik maupun akademik yang

3) merupakan sebuah keadaan yang lebih baik daripada apatis²⁸.

Akuntansi pemerintahan adalah sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang digunakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan untuk mengelola dan melacak dana publik yang mereka terima dan belanjakan.

Nordiawan, menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Akuntan pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara. Selain itu, bidang ini meliputi pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran negara, termasuk kesesuaiannya dengan UU yang berlaku²⁹.

Bentuk usaha untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disusun berdasarkan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang meliputi prinsip-prinsip, asumsi, karakteristik kualitatif, tujuan pelaporan keuangan, dan unsur-unsur laporan keuangan. Beberapa prinsip SAP meliputi basis akuntansi akrual, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, konsistensi, pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar. SAP menjadi dasar

²⁸ Yadiati Winwin, *Teori Akuntansi Suatu Pengantar* (Jakarta: Predana Media Group, 2010).

²⁹ Pravitarsi Eka Ningtyas and Dini Widyawati, 'Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4.1 (2015).

dalam menyusun laporan keuangan pemerintah dan mengatur tentang bagaimana pemerintah harus mengelola keuangannya³⁰.

Pada tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah selesai disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP No. 71 Tahun 2010. Standar akuntansi pemerintahan adalah suatu aturan, pedoman, dan praktik yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan oleh entitas pemerintah. Standar ini memberikan kerangka kerja untuk pengukuran, pengakuan, pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan informasi keuangan pemerintah. Standar ini mengadopsi sebagian besar prinsip-prinsip akuntansi yang juga digunakan dalam sektor swasta, namun dengan penyesuaian yang sesuai dengan karakteristik pemerintahan. Sehingga Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) digunakan oleh entitas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah³¹.

b. Karakteristik Khusus Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan memiliki Beberapa karakteristik khusus meliputi:

- 1) Anggaran, Akuntansi pemerintahan didasarkan pada anggaran yang disetujui oleh pemerintah. Setiap kegiatan atau pengeluaran harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
- 2) Pencatatan, Pencatatan yang akurat dan lengkap dari semua transaksi keuangan pemerintah merupakan prinsip penting dalam akuntansi

³⁰ Andri Dahriansyah, 'Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun' (Universitas Islam Riau, 2019).

³¹ Maryani Rusmana Oman, Setyaningrum Dyah, Yuliansyah, *Akuntansi Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2017).

pemerintahan. Semua pendapatan dan pengeluaran harus dicatat dengan tepat dan terperinci.

- 3) Pelaporan, Akuntansi pemerintahan melibatkan penyusunan laporan keuangan yang teratur dan komprehensif. Laporan-laporan ini mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
- 4) Pengawasan, Akuntansi pemerintahan juga melibatkan sistem pengendalian internal yang kuat untuk memastikan bahwa dana publik tidak disalahgunakan atau disalahgunakan. Hal ini melibatkan pembagian tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap transaksi keuangan.
- 5) Prinsip Akuntansi, Standar dan prinsip akuntansi yang berlaku umumnya juga digunakan dalam akuntansi pemerintahan. Prinsip-prinsip ini meliputi konsistensi, objektivitas, pertimbangan matang, relevansi, dan kewajaran.

Pada pelaksanaannya, akuntansi pemerintahan mencakup sejumlah tahapan meliputi pengelolaan anggaran, pengawasan keuangan, penyusunan laporan keuangan, pemeriksaan internal maupun eksternal, serta pengawasan oleh instansi pemerintah atau lembaga pengawas independen lainnya.

c. Indikator Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Mursyidi, indikator standar akuntansi pemerintahan meliputi:

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan keuangan pemerintah menggunakan basis akuntansi berbeda. Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas, di mana pendapatan diakui saat kas diterima dan belanja diakui saat kas dikeluarkan. Laporan ini tidak menggunakan konsep

laba rugi. Neraca menggunakan basis akrual, di mana aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui saat terjadinya transaksi atau peristiwa, tanpa memperhatikan arus kas. Meskipun demikian, Laporan Realisasi Anggaran tetap disusun berdasarkan basis kas.

2. Prinsip nilai historis

Aset dicatat sesuai nilai historisnya, yaitu sebesar pengeluaran kas atau nilai wajar imbalan yang diberikan pada saat aset diperoleh. Kewajiban dicatat sesuai jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan di masa depan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Nilai historis lebih dapat diandalkan karena bersifat objektif dan dapat diverifikasi. Jika tidak ada nilai historis, nilai wajar aset atau kewajiban dapat digunakan.

3. Prinsip realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia dan telah diotorisasi melalui anggaran selama tahun fiskal digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip pencocokan biaya terhadap pendapatan (*Matching Cost Against Revenue*) dalam akuntansi pemerintah tidak ditekankan seperti dalam akuntansi komersial.

4. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*Substance Over Form*)

Informasi harus menyajikan dengan wajar transaksi dan peristiwa yang seharusnya disajikan. Oleh karena itu, transaksi dan peristiwa lain perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonominya, bukan hanya aspek formalitasnya. Jika substansi transaksi atau peristiwa berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal itu harus diungkapkan

dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan³².

5. Prinsip periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan, seperti tahunan, bulanan, triwulan, dan semesteran. Hal ini dilakukan agar kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan secara berkala. Periode tahunan merupakan periode utama yang digunakan. Namun, periode yang lebih pendek seperti bulanan, triwulan, dan semesteran juga dianjurkan.

6. Prinsip konsistensi

Entitas pelaporan menerapkan perlakuan akuntansi yang sama untuk kejadian serupa dari periode ke periode (Prinsip Konsistensi Internal). Hal ini tidak berarti metode akuntansi tidak boleh diubah. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah asalkan metode baru memberikan informasi yang lebih baik daripada metode lama. Pengaruh perubahan penerapan metode akuntansi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Jadi, intinya adalah menggunakan metode akuntansi yang paling relevan dan reliable, dan mengungkapkan dampak perubahan metode.

7. Prinsip pengungkapan lengkap

Laporan keuangan menyajikan informasi yang lengkap dan dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan pengguna dapat disajikan baik pada lembar muka (halaman utama) laporan keuangan maupun dalam catatan atas laporan keuangan. Penyajian informasi

³² Miranda Nopianti, 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada SKPD Kota Bandung)' (Universitas Komputer Indonesia, 2019).

disesuaikan dengan kebutuhan pengguna laporan keuangan.

8. Prinsip penyajian wajar

Laporan keuangan menyajikan secara wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Ketika menghadapi ketidakpastian, pertimbangan sehat diperlukan agar penyajian laporan keuangan tetap andal dan netral. Ketidakpastian diungkapkan dengan menjelaskan sifat dan tingkatannya. Pertimbangan sehat menerapkan kehati-hatian dalam prakiraan kondisi tidak pasti sehingga aset atau pendapatan tidak terlalu tinggi dan kewajiban tidak terlalu rendah³³.

Indikator-indikator ini penting dalam konteks penerapan standar akuntansi pemerintahan untuk memastikan kualitas laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar yang berlaku.

d. Faktor Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Berbagai faktor mempengaruhi penerapan SAP, antara lain:

- 1) Kualitas sumber daya manusia: Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi mempengaruhi kesiapan dalam penerapan SAP berbasis akrual. Penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang berkuatan dengan pengalaman, keterampilan, dan motivasi dapat mempengaruhi penerapan standar akuntansi

³³ Irvan Ahsani, 'Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pengendalian Internal Serta Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah(Studi Pada SKPD Di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Teng', 2015.

pemerintahan. Dalam islam telah dijelaskan tentang kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut dapat dilihat dalam Q.S. Al- Qashash/28:26. yang berbunyi :

يُ أَيُّ الْأَمِينُ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَو

Terjemahnya :

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”” (QS. Al-Qashash 26)³⁴.

Isi ayat tersebut dapat dipahami bahwa seorang pemimpin mencari seseorang yang dapat dipercaya untuk melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Kualitas SDM yang memadai diperlukan dalam praktik penerapan kebijakan publik.

- 1) Komunikasi: Komunikasi yang baik antara pemangku keputusan, pemangku penilai, dan pemangku eksekusi sangat penting untuk menyampaikan informasi tentang SAP berbasis akrual dan mengatasi hambatan dalam penerapan standar.
- 2) organisasi: Komitmen organisasi yang tinggi dari pemangku keputusan, pemangku penilai, dan pemangku eksekusi juga berkontribusi dalam penerapan SAP berbasis akrual.

³⁴ *Kementrian Agama RI: Al-Quran dan Terjemahannya. Qur'an Kemenag (Adelia Desti Indah,2023)*

- 3) Gaya kepemimpinan: Gaya kepemimpinan yang efektif dan profesional mempengaruhi penerapan SAP berbasis akrual. Penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang baik mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintahan³⁵.

Selain itu, reformasi pengelolaan keuangan negara, infrastruktur sistem keuangan, dan penyiapan sumber daya manusia juga merupakan faktor penting dalam penerapan SAP berbasis akrual. Dengan demikian, penerapan SAP berbasis akrual didorong oleh upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah³⁶.

e. Tujuan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Tujuan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual adalah untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah dan memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Berikut ini adalah beberapa tujuan dari penerapan SAP berbasis akrual:

1. Menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor dalam penyajian laporan keuangan pemerintah.
2. Menyediakan pedoman menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah.

³⁵Devi Safitri, 'Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Pada Skpd Pemerintah Kabupaten Bengkalis)', *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 5.2 (2017), 174–89.

³⁶Edison Hamid, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual', *Parameter*, 2.2 (2017).

4. Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan.
5. Menciptakan sistem informasi yang efisien dan efektif untuk mendukung pengelolaan keuangan pemerintah³⁷.

Penerapan SAP berbasis akrual, beberapa faktor-faktor penting yang mempengaruhi kesiapan penerapan standar ini meliputi kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, sistem informasi, dan komunikasi. Oleh karena itu, perlu memperhatikan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia, komunikasi, dan komitmen organisasi untuk memastikan penerapan SAP berbasis akrual berhasil dan efektif.

f. Manfaat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual memiliki sejumlah manfaat yang signifikan. Pertama, SAP berbasis akrual membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah dengan memperbaiki daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan. Kedua, hal ini memungkinkan laporan keuangan untuk mencerminkan informasi yang akurat dan aman, yang mendukung pada transaksi yang terjadi selama periode laporan. Ketiga, penerapan SAP berbasis akrual juga membantu meningkatkan transparansi pemerintah dengan menyajikan informasi yang lebih jelas dan akurat tentang keuangan pemerintah. Selain itu, SAP berbasis akrual memastikan konsistensi dalam pelaporan keuangan, sehingga informasi yang disajikan memiliki kredibilitas

²²Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual'
<<https://kalbar.bpk.go.id/standar-akuntansi-pemerintahan-sap-berbasis-akrual/>>.

yang tinggi.

Hal ini mendukung pada pengungkapan keuangan berdasarkan transaksi yang terjadi selama periode laporan, dengan mengungguli jumlah keuangan berdasarkan transaksi yang diperkirakan akan terjadi di masa depan. Secara keseluruhan, penerapan SAP berbasis akrual membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan, mencerminkan informasi yang akurat dan aman, meningkatkan transparansi, menjamin konsistensi, meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan pendapatan pajak³⁸.

Mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis komputer, pemerintah daerah dapat menggunakan komputer untuk mengerjakan beberapa tahapan dalam siklus akuntansi secara otomatis. Hal ini akan menghemat waktu dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Selain itu, informasi laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih tepat waktu, lebih beragam, serta memiliki kualitas yang lebih baik.

4. Kualitas Laporan Keuangan

a. Definisi Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan seperangkat informasi yang bersifat kuantitatif (keuangan) mengenai badan usaha (entitas) yang digunakan oleh beberapa pengguna untuk mengambil keputusan dan sebagai dasar untuk memprediksi masa depan³⁹. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok

³⁸ Lina Rosana and Risma Wira Bharata, 'Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan', *Jurnalku*, 3.1 (2023), 23–34.

³⁹ Wijayanti Nanda Ayu Arif, Muhammad faisal, Anwar, *Akuntansi Keuangan Menengah 2 Berbasis PSAK* (Jakarta: Salemba Empat, 2021).

pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara⁴⁰.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan setiap pemakai memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda terhadap informasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan diantara kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dapat timbul konflik kepentingan. Laporan keuangan pemerintahan disediakan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok pemakai (*General Purposive*), meskipun setiap kelompok pemakai memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda⁴¹.

Kebutuhan informasi laporan pemerintah tersebut dapat diringkas sebagai berikut :

1. Masyarakat pengguna layanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan.
2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui

⁴⁰ Tuti Herawati and Defi Nopianti, 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah', *STAR*, 14.2 (2017), 32–45.

⁴¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2018).

keberadaan dan penggunaan dan yang telah diberikan. Publik ingin mengetahui apakah pemerintah telah melakukan ketaatan fiskal dan ketaatan pada peraturan perundangan atas pengeluaran-pengeluaran yang lakukan.

3. Kreditur dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas.
 4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewangan keuangan negara.
 5. Manajer publik membutuhkan informasi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis.
 6. Pengawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.
- c. Manfaat Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang berguna (*useful*) memiliki makna laporan keuangan tersebut memuat isi informasi (*information content*). Informasi akan dikatakan bermanfaat bila informasi tersebut dapat membantu dan mendukung pengambilan keputusan serta dapat dipahami oleh para pemakainya. Laporan Keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam upaya mengambil kebijakan suatu pemerintahan di masa yang akan datang. Laporan keuangan berkualitas dapat dilihat dari opini dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ada strata penilaian laporan keuangan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan

Badan Pemeriksa Keuangan. Selain opini dari Badan Pemeriksa Keuangan, Kualitas Laporan Keuangan dapat dilihat juga apabila telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)⁴².

Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 24 Pemerintah 24 Tahun 2005 yang telah diperbarui dengan peraturan pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diperbarui dengan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kemudian, Laporan Keuangan Pemerintah daerah setiap tahun akan diperiksa oleh BPK dan setelah dipertanggungjawabkan ke DPRD Provinsi Kabupaten/Kota⁴³. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

d. Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut Baldric Siregar, indikator kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan jika informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan

⁴² Putriasri Pujanira dan Abdullah Taman, 'Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy', *Jurnal Nominal, Volume, Volume VI* (2017).

⁴³ dadang Suwanda Dan Hendri Santosa, *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman Pada Sap Untuk Pemerintah Daerah* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2014).

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut:

a) Manfaat umpan balik (*Feedback Value*).

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b) Manfaat prediktif (*Predictive Value*).

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat waktu (*Timeliness*).

Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap.

Informasi yang disajikan mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:

a) Penyajian jujur.

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat diverifikasi (*Verifiability*).

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas.

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna⁴⁴.

Keempat karakteristik diatas merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

Kualitas setiap laporan keuangan dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor, mulai dari kualitas informasi dan organisasi, sumber daya manusia, pemahaman akuntansi dan modal, pengendalian intern, hingga sumber daya

⁴⁴ Aprsiansyah, Rahayu, and Erwati.

manusia dan modal pemahaman akuntansi dan modal. Oleh karena itu, penting bagi pemangku kepemimpinan pemerintah untuk memahami dan mengelola faktor-faktor ini untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan⁴⁵.

C. Kerangka Pikir

Menurut Sugiono kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan beragam aspek yang sudah diidentifikasi. Kerangka berpikir penelitian ialah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan.⁴⁶ Kerangka berpikir memuat teori atau dalil serta konsep-konsep yang menjadi dasar dalam penelitian. Kerangka berpikir ini menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel. Kerangka berpikir dapat disajikan dalam bentuk bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti dan keterkaitan antar variabel yang ditelitinya.⁴⁷

Dalam sub bab ini akan diaplikasikan seluruh teori-teori yang digunakan pada teoritis diatas, dimana teori-teori tersebut akan diaplikasikan pada objek dan subjek penelitian untuk menjawab sejauh mana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor kementerian agama kota Parepare. Teori yang digunakan pada penelitian untuk menjawab rumusan masalah deskriptif adalah Teori Entity dan Teori Stakeholder. Teori *Entity* dalam konteks akuntansi merujuk pada pandangan bahwa entitas atau organisasi memiliki identitas yang terpisah dari pemiliknya atau individu-individu yang terlibat dalam entitas tersebut. Dalam hal ini, Kantor Kementerian Agama Kota Parepare dianggap sebagai sebuah entitas tersendiri dengan kebutuhan untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan relevan. Sedangkan, Teori Stakeholder memiliki

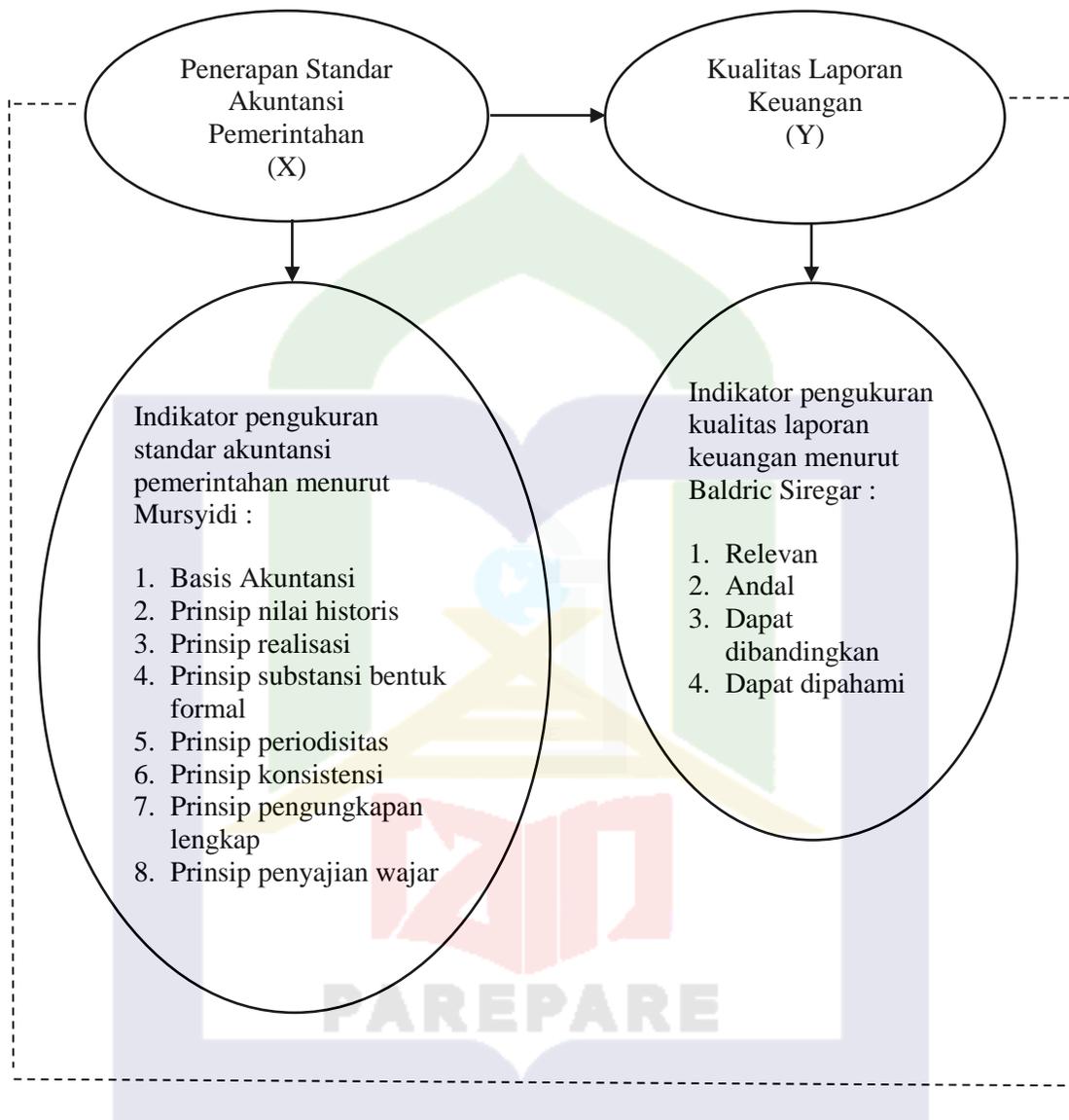
⁴⁵ Siti Johanne Hartiyani, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang' (Politeknik Negeri Sriwijaya, 2017).

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2017), p. 63.

⁴⁷ Akdon, Riduwan. *Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika*. Bandung: Alfabeta, 2011

pandangan bahwa entitas atau organisasi memiliki kewajiban untuk memperhitungkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terpengaruh oleh kegiatan dan keputusan mereka, yang disebut sebagai stakeholder. Stakeholder ini bisa berupa pihak internal seperti manajemen dan karyawan, serta pihak eksternal seperti pemerintah, masyarakat, dan lain sebagainya. Dengan demikian, penerapan standar akuntansi pemerintahan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Kantor Kementerian Agama Kota Parepare dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan stakeholder yang beragam.





Gambar 2.1: Bagan kerangka pikir

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara yang dimaksud untuk menjawab permasalahan yang ada.

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang di berikan baru didasar pada teori yang relevan, belum di dasarkan pada fakta – fakta empiris yang di peroleh melalui pegumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang *empiric*”.⁴⁸

Berdasarkan kerangka pemikiran dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengambil 3 hipotesis sementara dalam memecahkan masalah tersebut, yaitu:

Pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada dasarnya, standar akuntansi di pemerintahan terkait dengan keakuratan laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah standar yang diikuti oleh lembaga pemerintah pusat maupun daerah dalam mewujudkan mutunya sebuah laporan suatu keuangan. Landasan dari setiap sistem akuntansi di pemerintahan yang efektif yakni mudah dipahami dan tingginya kualitas pada laporan keuangan tersebut. Akibatnya, ketika membuat laporan keuangan berkualitas tinggi standar akuntansi tata kelola yang baik harus dipatuhi. Hal tersebut didukung oleh penelitian Satriani Binti Ansar menunjukkan bahwa nilai regresi sebesar 0,175 dan nilai signifikan sebesar 0.005 lebih kecil dari tingkat signifikan 0.05 yang menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.⁴⁹ Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2017), p. 63.

⁴⁹ SATRIANI BINTI Ansar, ‘Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar’, *Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2018.

H₁: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor Kementerian Agama kota Parepare.

Seberapa baik standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan

Kualitas laporan keuangan menunjukkan bagaimana kondisi suatu pemerintahan. Apabila kualitasnya baik maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah tersebut telah menjalankan pemerintahannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan standar akuntansi pemerintah dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan sebaliknya, jika kualitas laporan keuangan suatu pemerintah itu buruk maka dapat diindikasikan masih ada permasalahan dan buruknya sistem pemerintahan disuatu daerah, sehingga masih banyak hal yang perlu diperbaiki baik dalam standar akuntansi yang belum sesuai pengendalian internal.⁵⁰ Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: Penerapan standar akuntansi pemerintahan cukup baik terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor kementerian agama kota parepare dari yang dihipotesiskan (μ_0).

⁵⁰ Dariana Dariana and Jonase Oktavia, 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan', *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 2.1 (2018), 77–105.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode survei kemudian membagikan kuesioner pada responden. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang lebih menekankan pada pengumpulan data kuantitatif yang berbentuk angka ataupun diangkakan.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Peneliti dalam hal ini dilakukan di kantor Kementerian Agama Kota Parepare jalan Cappa Galung, Kec. Bacukiki Bar., Kota Parepare, dengan waktu penelitian kurang lebih 2 bulan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya⁵¹. Dengan demikian populasi merupakan sumber suatu penyimpulan atas suatu fenomena. Karena penelitian ini dilakukan Pada Kantor Wilayah Kementrian Agama kota Parepare, maka populasi sasaran yang dipilih berdasarkan lokasi penelitian adalah 36 orang pegawai di Kantor Kementrian Agama kota Parepare yang menangani bagian keuangan pada masing-masing satuan kerja (Satker).

⁵¹ Sinaga Dameria, *Buku Ajar Statistik Dasar* (Uki Press, 2014).

2. Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling⁵². Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Menurut sugiyono, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua populasi digunakan sebagai sampel. Sampel jenuh disebut juga sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.

D. Teknik Pengumpulan dan pengolahan Data

Langkah paling strategis dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data. Peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar jika tidak memahami teknik pengumpulan data. Dalam teknik penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data konkrit tentang masalah yang akan diteliti. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data-data dilapangan yaitu:

a. Observasi

Pengamatan atau observasi berarti melihat dengan penuh perhatian. Dalam konteks penelitian, observasi diartikan sebagai metode pencatatan tingkah laku secara sistematis dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung.

b. Kuesioner atau angket

Responden ditanyai atau diminta untuk menuliskan tanggapan mereka sebagai bagian dari proses pengumpulan data yang dilakukan melalui kuosioner⁵³.

Adapun isi dari kuosioner membahas topik yang berkaitan dengan subjek

⁵² Dkk. Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020).

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2013)

penelitian. Data kuantitatif berupa angka merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk menangani dan menginterpretasikan data kuantitatif, teknik komputasi matematis atau statistik akan digunakan. Pengolahan data merupakan usaha mempersiapkan data untuk dianalisis⁵⁴. Pada penelitian ini data diolah menggunakan aplikasi *Statistic Program For Social Science (SPSS)*.

E. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati (diobservasi)⁵⁵. Variabel merupakan objek pengamatan yang terdapat dalam penelitian yang akan menjadi konsep yang dapat didefinisikan melalui kerangka pikir yang telah ditentukan. Definisi operasional variabel pada umumnya dibagi dari teori yang digunakan yang meliputi variabel, indikator dan skala pengukuran dan lain-lain⁵⁶. Berikut adalah variabel dalam penelitian ini:

1. Variabel Terikat

Variabel terikat atau *dependent variabel* adalah variabel respon atau output. “sebagai variabel respon berarti variabel ini akan muncul sebagai akibat dari manipulasi atau variabel-variabel yang dimanipulasikan dalam penelitian, yang dimaksud dengan variabel bebas”⁵⁷. Dengan kata lain, variabel dependen adalah

⁵⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, ed. by Syahrani, *Antasari Press*, I (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011).

⁵⁵ Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian Edisi Revisi Tahun 2021* (Ur Press Pekanbaru, 2021).

⁵⁶ Firdaus Hamta, *Buku Bahan Ajar Metode Penelitian Akuntansi* (Deepublish : Yogyakarta., 2015, 2015).

⁵⁷ Dkk. Ratna Wijayanti Daniar Paramita, *Metode Penelitian Kuantitatif: Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa Akuntansi & Manajemen* (Jawa Timur: Widya Gama Press, 2021).

variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, tetapi variabel ini tidak dapat memengaruhi variabel lainnya.

Pada penelitian ini, variabel terikat yaitu Kualitas Laporan Keuangan (Y). Laporan keuangan merupakan informasi keuangan (kuantitatif) tentang entitas bisnis yang digunakan untuk pengambilan keputusan dan prediksi masa depan⁵⁸. Menurut Baldric Siregar, Kualitas Laporan Keuangan dapat diukur dengan menggunakan indikator kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

- a. Relevan, artinya laporan keuangan bisa dikatakan relevan jika informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
- b. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
- c. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- d. Dapat dipahami, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2. Variabel Bebas

“Variabel bebas adalah atau *Independent variabel* adalah variabel yang

⁵⁸ Arif, Muhammad faisal , Anwar.

diduga sebagai sebab munculnya variabel terikat”. Variabel bebas ini dapat dikatakan sebagai variabel yang mempengaruhi variabel lainnya.

Pada penelitian ini yang menjadi Variabel bebas yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Menurut mursyidi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah diukur melalui kuesioner dengan menggunakan Skala Likert, dengan indikator sebagai berikut:

- a. Basis akuntansi, meliputi basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas, serta basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- b. Prinsip nilai historis, yaitu informasi seputar transaksi yang telah terjadi sebelumnya.
- c. Prinsip realisasi, yaitu informasi seputar transaksi yang akan terjadi dalam masa depan.
- d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal, Informasi harus menyajikan dengan wajar transaksi dan peristiwa yang seharusnya disajikan.
- e. Prinsip periodisitas, yaitu kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan, seperti tahunan, bulanan, triwulan, dan semesteran.
- f. Prinsip konsistensi, yaitu perlakuan akuntansi yang sama untuk kejadian serupa dari periode ke periode (prinsip konsistensi internal).
- g. Prinsip pengungkapan lengkap, artinya laporan keuangan menyajikan

informasi yang lengkap dan dibutuhkan oleh pengguna laporan.

- h. Prinsip penyajian wajar, artinya laporan keuangan menyajikan secara wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ialah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian agar pekerjaannya lebih mudah dan lebih baik, lebih akurat, teliti, dan sistematis sehingga lebih mudah dalam penanganannya⁵⁹. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dikumpulkan dengan metode kuesioner pada seluruh pegawai kantor Kementerian Agama di kota Parepare.

Instrument penelitian ini adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.⁶⁰ Pada hakekatnya instrument penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data guna kepentingan penelitian. Keandalan data yang dihasilkan peneliti sangat dipengaruhi oleh kualitas alat ukur yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian. Setiap instrumen yang baik memiliki kriteria penelitian tertentu yang akan menghasilkan hasil yang berkualitas tinggi. Demikian pula instrumen yang tidak memiliki kriteria penelitian yang baik akan menghasilkan kualitas yang buruk.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dalam bentuk observasi dan koesioner yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan *skala likert*. *Skala likert* merupakan pernyataan sikap atau pendapat atau jawaban seseorang dari penelitian instrument dan dinyatakan dalam angka.⁶¹

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, 'Metodelogi Penelitian', *Yogyakarta: Bina Aksara*, 2006.

⁶⁰ I Komang Sukendra and I Atmaja, 'Instrumen Penelitian', 2020.

⁶¹ Firdaus Hamta, 'Metodologi Penelitian Akuntansi', *Yogyakarta: Deepublish*, 2015.

Dalam penelitian ini hanya 1-5 poin *Skala likert* yang digunakan. Berikut adalah tabel poin *skala likert* yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3.1 skala Likert

Pernyataan	Keterangan	Skor
Sangat Setuju	SS	5
Setuju	S	4
Kurang Setuju	KS	3
Tidak Setuju	TS	2
Sangat Tidak Setuju	STS	1

Sumber: Buku Metodologi Penelitian, Sugiono

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai adalah uji regresi linear sederhana. Urutan pengolahan data dimulai dengan melaksanakan uji normalitas data kedua variabel guna mengetahui apakah instrumen riset terdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya dalam pengujian hipotesis, peneliti menerapkan rumus regresi. Penelitian ini mengaplikasikan teknik analisis data regresi linear sederhana. Alasan penggunaan teknik ini adalah karena riset hanya melibatkan satu variabel dependen (Implementasi SAP) dan satu variabel independen (Kualitas laporan keuangan). Model regresi yang dibangun sesuai dengan tujuan riset menurut Sugiyono.

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini harus di uji validitas dan reabilitasnya terlebih dahulu. Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana ketepatan alat ukur penelitian tentang isu atau arti sebenarnya yang

diukur (Ghozali). uji validitas bertujuan untuk menilai seberapa akurat dan konsisten alat ukur dalam mengukur konstruk atau variabel yang sedang diteliti⁶². Uji validitas dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, termasuk uji statistik dan analisis faktor. Hasil uji validitas yang baik menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian memiliki ketepatan dan kecermatan dalam mengukur konstruk yang diteliti.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji konsistensi kuesioner dalam mengukur suatu kontrak yang sama atau stabilitas kuesioner jika digunakan dari waktu ke waktu (Ghozali). Untuk uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien *Alpha Cronbach's*. Koefisien ini merupakan reliabilitas yang paling sering digunakan karena koefisien ini menggambarkan variasi dari item item, baik untuk format benar atau salah atau bukan, seperti format pada skala Likert sehingga koefisien yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi *internal consistency*. Jika koefisien alpha yang dihasilkan lebih besar dari 0,60 ($a > 0,60$) maka instrument tersebut dikatakan reliable, apabila sebaliknya alpha lebih rendah dari 0,60 ($a < 0,60$) maka instrument tersebut tidak reliable⁶³.

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan sebagai tahap awal sebelum dilanjutkan

⁶² Nilda Miftahul Janna and H Herianto, 'Konsep Uji Validitas Dan Reliabilitas Dengan Menggunakan SPSS', 2021.

⁶³ Tengku Asri Yunita, Amries Rusli Tanjung, and Lila Anggraini, 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Kota Dumai)' (Riau University, 2015).

ke pengujian berikutnya dengan menggunakan model regresi linier berganda.⁶⁴

Berikut adalah uji asumsi klasik dalam penelitian ini:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah faktor perancu atau residual dari model regresi terdistribusi secara teratur. Keseragaman residu dapat diperiksa menggunakan uji statistik serta analisis grafis. Teknik statistik digunakan untuk memeriksa normalitas data penelitian. Uji Satu Sampel *Kolmogorov-Smirnov* adalah metode analisis statistik yang digunakan. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 ($P > 0,05$), data dianggap normal. Jika nilai signifikan pada ($P < 0,05$) kurang dari 0,05, maka data dianggap tidak normal⁶⁵.

Penelitian ini, uji normalitas dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah data yang telah terkumpul berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas yang baik menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian memiliki sebaran yang normal dan dapat digunakan untuk melakukan analisis statistik parametrik, seperti uji regresi linear sederhana.

b. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Agussalim Manguluang, uji heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi terjadinya heteroskedastisitas ditunjukkan dengan adanya ketidaksamaan varian nilai residualnya antara variabel-variabel bebas yang dapat dideteksi melalui perhitungan uji koefisien korelasi rank Spearman dan grafik. Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada pada grafik Scatter Plot. Untuk menguji ada

⁶⁴ I Gusti Ayu Purnamawati and Saarce Elsy Hatane, "Corporate Risks and The Impact on Earnings Management", *Jurnal Akuntansi* 13, no. 2 (2022).

⁶⁵ Yudi Marihot, Sapta Sari, and Anis Endang, "Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif", *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 1.1 (2022).

atau tidak heteroskedastisitas dapat ditunjukkan bahwa koefisien korelasi dari seluruh variabel bebas adalah lebih kecil dari 0.05⁶⁶.

3. Uji Hipotesis

a. Regresi Linear Sederhana

Uji regresi linear sederhana adalah teknik analisis data yang digunakan untuk mengevaluasi hubungan secara linear antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Teknik ini digunakan untuk memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang terkait dan diketahui. Dalam penelitian ini mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor Kementerian Agama kota Parepare, teknik analisis data regresi linear sederhana dapat digunakan untuk menentukan sejauh mana penerapan standar akuntansi pemerintahan memengaruhi kualitas laporan keuangan.

Uji regresi linear sederhana dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel independen dan dependen. Hasil uji regresi linear sederhana dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diberikan. Selain itu, uji regresi linear sederhana juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kekuatan hubungan antara variabel independen dan dependen.

$$\hat{Y} = a + bX$$

⁶⁶ Oktriana Arza, Yulia Syafitri, and Delori Nancy Meyla, 'Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Padang Panjang', *Pareso Jurnal*, 3.3 (2021), 519–42.

Dimana:

Y: Variabel dependen (kualitas laporan keuangan pemerintah)

X: Variabel independen (penerapan SAP)

b: Angka arah atau koefisien regresi

a: *Intercept* atau konstanta⁶⁷

b. Pengujian secara persial (Uji t)

Uji t merupakan uji yang pada dasarnya memberikan sebuah gambaran antara pengaruh satu variabel penjelas secara individual pada saat menjelaskan variasi dari variabel dependen. Uji t dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t : Nilai Signifikan (t_{hitung}) yang nantinya di bandingkan dengan t_{tabel}

r : Koefisien korelasi

n : banyaknya sampel

Adapun kriteria pengambilan kesimpulannya sebagai berikut:

- a) Membandingkan t hitung dengan t tabel
 - 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 diterima
 - 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 ditolak
- b) Berdasarkan signifikansi
 - 1) Jika $sig. < \alpha$, maka H_0 diterima
 - 2) Jika $sig. > \alpha$, maka H_0 ditolak⁶⁸.

⁶⁷ Budi Darma, *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2)* (Guepedia, 2021).

c. Uji Koefisien Determinasi (*Adjust R Square*)

Uji koefisien determinasi (*Adjust R Square*) berfungsi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat nilai pada uji ini berkisar antara nol sampai satu. Apabila nilai koefisien determinasi (R^2) yang dihasilkan kecil, artinya terdapat keterbatasan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Sedangkan bila nilai koefisien determinasi (R^2) mendekati angka satu, berarti variabel independen memiliki kaitan informasi yang kuat dalam menjelaskan variabel dependennya⁶⁹.

d. Uji F (*Goodness of fit test*)

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir suatu nilai aktual (*goodness of fit*). Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fit* atau tidak. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji F adalah berupa level signifikan 5% dengan derajat kebebasan pemilang $df = k$ dan derajat kebebasan penyebut (df) = $n-k-1$ dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $P\ value < \alpha = 0,05$, maka model yang digunakan dalam penelitian bagus (*fit*).

⁶⁸ hari Munira, 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Dpkad) Pada Pemerintah abupaten Aceh Tengah' (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan' (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021).

⁶⁹ Romdlonah Za'imatul Mawaddah, 'Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, SPI, Kompetensi Staf Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada OPD Kabupaten Pati)' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022) <https://repository.unissula.ac.id/27869/2/31401800154_fullpdf.pdf>.

- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $P\ value > \alpha = 0,05$, maka model yang digunakan dalam penelitian tidak bagus (tidak *fit*)⁷⁰.

4. Uji *One Sample t Test*

Uji *one sample t-test* merupakan uji yang digunakan untuk satu sampel data. Hasil dari satu sampel tersebut dibandingkan dengan suatu value atau nilai konstanta tertentu. Sehingga dari perbandingan tersebut dapat diketahui apakah sampel data yang kita punya lebih tinggi atau lebih rendah dari value yang telah ditetapkan. Syarat dari uji ini adalah data yang digunakan data kuantitatif dan berdistribusi normal⁷¹. Selain itu, uji *one sample t-test* dapat juga dipakai untuk menguji hipotesis dalam statistik deskripsif jika data penelitian berskala interval atau rasio. Uji *one sample t-test* memerlukan asumsi dasar bahwa data penelitian berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, maka uji *one sample t-test* tidak dapat digunakan.

Langkah-langkah uji *one sample t-test* meliputi:

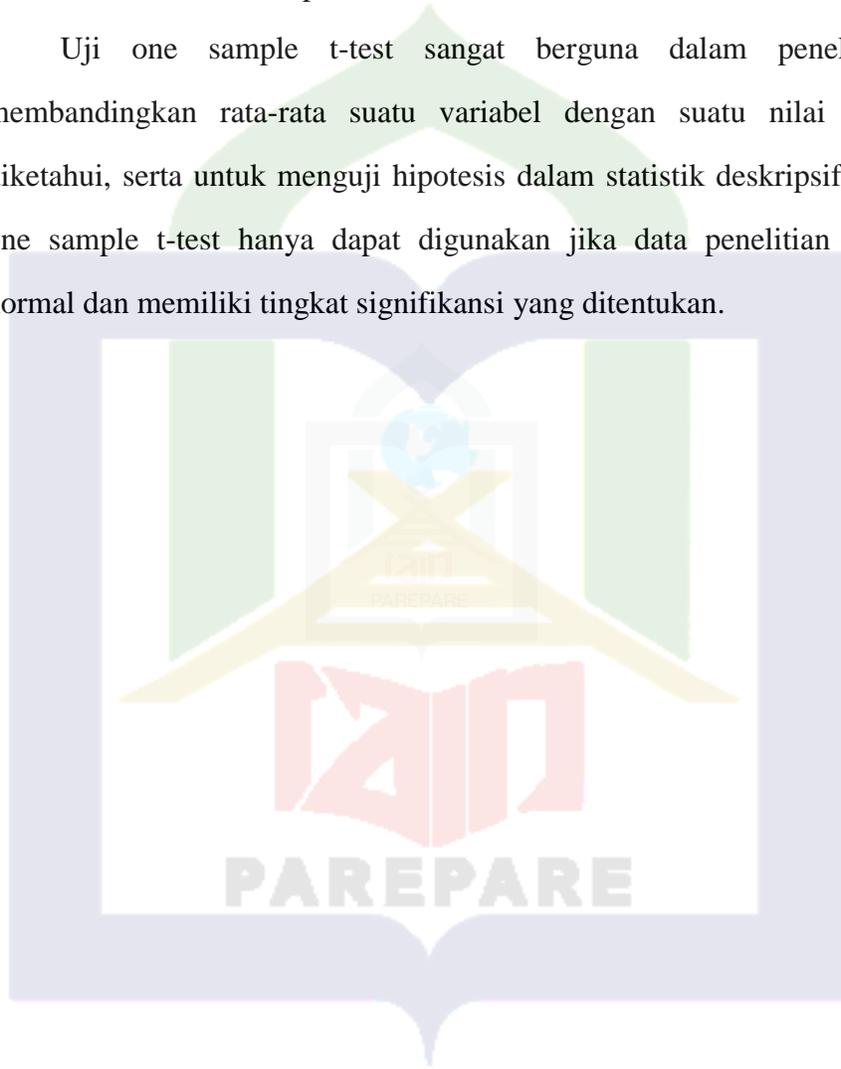
1. Memilih variabel yang akan diuji.
2. Menghitung rata-rata variabel tersebut.
3. Menghitung nilai t (t hitung) dengan menggunakan rata-rata variabel dan standar deviasi.
4. Menghitung nilai t tabel dengan menggunakan tingkat signifikansi yang ditentukan.

⁷⁰ Widya Mutiara Ningrum, 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Opd Di Kota Dan Kabupaten Magelang)' (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019).

⁷¹ Alfiani Athma Putri Rosyadi, *Statistika Pendidikan* (Malang: UMM Press, 2018).

5. Menginterpretasikan hasil uji dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Jika nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel, maka hipotesis nol ditolak, dan sebaliknya, jika nilai t hitung lebih kecil daripada nilai t tabel, maka hipotesis nol diterima.

Uji one sample t -test sangat berguna dalam penelitian untuk membandingkan rata-rata suatu variabel dengan suatu nilai yang sudah diketahui, serta untuk menguji hipotesis dalam statistik deskriptif. Namun, uji one sample t -test hanya dapat digunakan jika data penelitian berdistribusi normal dan memiliki tingkat signifikansi yang ditentukan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Hasil penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Agama Parepare yang merupakan lokasi penelitian dilakukan, berdasarkan beberapa karakteristik responden, berikut data identitas responden dijelaskan:

a. Identitas Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam Penelitian ini dikategorikan responden berdasarkan jenis kelamin yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-Laki	19	52,78
Perempuan	17	47,22
Total	36	100

Sumber Data: Data Primer, 2024

Data responden di atas dikategorikan berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa dari total 36 responden, sebanyak 19 orang (52,78%) adalah laki-laki dan 17 orang (47,22%) adalah perempuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proporsi responden laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan responden perempuan.

b. Identitas Responden berdasarkan Pendidikan

Dalam Penelitian ini dikategorikan responden berdasarkan pendidikan yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2 Data Responden berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
SMA	0	0,00
D2	2	5,56
D3	0	0,00
S1	25	69,44
S2	7	19,44
S3	2	5,56
Total	36	100

Sumber Data: Data Primer, 2024

Data penelitian di atas dikategorikan menurut tingkat pendidikan yang telah ditempuh menunjukkan distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan. Dari total 36 responden, tidak ada yang hanya berpendidikan SMA (0,00%). Sebanyak 2 orang (5,56%) memiliki pendidikan D2, sementara tidak ada responden yang berpendidikan D3 (0,00%). Sebagian besar responden, yaitu 25 orang (69,44%), memiliki gelar S1. Selain itu, terdapat 7 orang (19,44%) yang memiliki gelar S2, dan 2 orang (5,56%) yang telah mencapai pendidikan S3. Data ini berasal dari data primer yang dikumpulkan pada tahun 2024. Mayoritas responden memiliki pendidikan tinggi, dengan sebagian besar berada pada tingkat S1, diikuti oleh S2 dan sejumlah kecil responden dengan gelar D2 dan S3. Tidak adanya responden dengan pendidikan SMA dan D3 menunjukkan bahwa populasi penelitian ini terdiri dari individu-individu yang umumnya berpendidikan tinggi.

c. Identitas Responden berdasarkan Umur

Dalam Penelitian ini dikategorikan responden berdasarkan Umur yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3 Data Responden berdasarkan Umur

Umur	Frekuensi	Persentase (%)
20>25	0	0,00
26>35	19	52,78
36>45	14	38,89
46>55	3	8,33
56>	0	0,00
Total	36	100

Sumber Data: Data Primer, 2024

Data berdasarkan umur menunjukkan mayoritas responden berada dalam rentang usia 26 hingga 45 tahun. Kategori usia 26-35 tahun memiliki frekuensi tertinggi, mencapai 52,78%, diikuti oleh kategori usia 36-45 tahun dengan frekuensi 38,89%. Sementara itu, hanya sebagian kecil responden yang berusia 46-55 tahun atau 8,33% dari total responden. Tidak ada responden yang berusia di bawah 25 tahun atau di atas 56 tahun dalam penelitian ini.

d. Identitas Responden berdasarkan Lama Bekerja

Dalam Penelitian ini dikategorikan responden berdasarkan Lama Bekerja yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4 Data Responden berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja	Frekuensi	Persentase (%)
<1 Tahun	0	0,00
1-3 Tahun	12	33,33

4-5 Tahun	15	41,67
>5 Tahun	9	25,00
Total	36	100

Sumber Data: Data Primer, 2024

Data lama bekerja di atas dijelaskan berdasarkan lama bekerja bahwa mayoritas responden berada dalam rentang kerja 4-5 tahun dengan persentasi 41,67% kemudian lama bnekerja dengan 1-3 tahun dengan persentasi 33,33% dan lama bekerja diatas 5 tahun dengan persentasi 25,00%.

2. Analisis Deskriptif

Adapun hasil analisis deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Data deskriptif Standar Akuntansi Pemerintahan (X)

Deskriptif analisis pada variabel X yaitu berkaitan dengan standar akuntansi pemerintahan (X) dari 36 responden dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Standar Akuntansi Pemerintahan	36	51	80	71.75	4.87
Valid N (listwise)	36				

Tabel 4.5 menunjukkan statistik deskriptif dari masing-masing variabel penilaian. Berdasarkan hasil analisis menggunakan statistik deskriptif terhadap varibel standar akuntansi pemerintahan (X) menunjukkan nilai minimum sebesar 51, nilai maksimum sebesar 80, dan *mean* (rata-rata) sebesar 71.75 dengan standar deviasi sebesar 4.87.

Adapun hasil data deskriptif berdasarkan item pertanyaan yaitu sebagai berikut:

Item Pernyataan	Frekuensi Dan Persentase					Kategori Dominant
	SS	S	KS	TS	STS	
Item 1	92	8	0	0	0	Sangat Setuju
Item 2	92	8	0	0	0	Sangat Setuju
Item 3	42	19	28	11	0	Sangat Setuju
Item 4	81	19	0	0	0	Sangat Setuju
Item 5	58	8	31	3	0	Sangat Setuju
Item 6	44	44	6	6	0	Sangat Setuju
Item 7	56	8	36	0	0	Sangat Setuju
Item 8	86	11	0	3	0	Sangat Setuju
Item 9	50	11	36	3	0	Sangat Setuju
Item 10	64	31	6	0	0	Sangat Setuju
Item 11	75	17	6	3	0	Sangat Setuju
Item 12	56	33	11	0	0	Sangat Setuju
Item 13	67	19	14	0	0	Sangat Setuju
Item 14	81	17	0	3	0	Sangat Setuju
Item 15	61	14	25	0	0	Sangat Setuju
Item 16	58	17	22	3	0	Sangat Setuju

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa:

1. Item 1 menunjukkan bahwa jumlah (92%) sangat setuju.
2. Item 2 menunjukkan bahwa jumlah responden (92%) sangat setuju.
3. Item 3 menunjukkan bahwa jumlah responden 42% sangat setuju, 19% setuju, 28% kurang setuju, dan 11% tidak setuju.
4. Item 4 menunjukkan bahwa jumlah responden 81% sangat setuju, 19% setuju.
5. Item 5 menunjukkan bahwa jumlah responden 58% sangat setuju, 8% setuju, 31% kurang setuju, dan 3% tidak setuju.
6. Item 6 menunjukkan bahwa jumlah responden 44% sangat setuju, 44% setuju, 6% kurang setuju, dan 6% tidak setuju.
7. Item 7 menunjukkan bahwa jumlah responden 56% sangat setuju, 8% setuju, dan 36% kurang setuju.
8. Item 8 menunjukkan bahwa jumlah responden 86% sangat setuju, 11% setuju, dan 3% kurang setuju.
9. Item 9 menunjukkan bahwa jumlah responden 50% sangat setuju, 11% setuju, 36% kurang setuju, dan 3% tidak setuju.
10. Item 10 menunjukkan bahwa jumlah responden 64% sangat setuju, 31% setuju, dan 6% kurang setuju.
11. Item 11 menunjukkan bahwa jumlah responden 75% sangat setuju, 17% setuju, 6% kurang setuju, dan 3% tidak setuju.
12. Item 12 menunjukkan bahwa jumlah responden 56% sangat setuju, 33% setuju, dan 11% kurang setuju.

13. Item 13 menunjukkan bahwa jumlah responden 67% sangat setuju, 19% setuju, dan 14% kurang setuju.
14. Item 14 menunjukkan bahwa jumlah responden 81% sangat setuju, 17% setuju, dan 3% kurang setuju.
15. Item 15 menunjukkan bahwa jumlah responden 61% sangat setuju, 14% setuju, dan 25% kurang setuju.
16. Item 16 menunjukkan bahwa jumlah responden 58% sangat setuju, 17% setuju, 22% kurang setuju, dan 3% tidak setuju.

b. Data deskriptif Laporan Keuangan (Y)

Deskriptif analisis pada variabel Y yaitu berkaitan dengan Laporan Keuangan (Y) dari 36 responden dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Laporan Keuangan	36	27	40	36.19	2.84
Valid N (listwise)	36				

Tabel 4.6 menunjukkan statistik deskriptif dari masing-masing variabel penilaian. Berdasarkan hasil analisis menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel laporan keuangan (Y) menunjukkan nilai minimum sebesar 27, nilai maksimum sebesar 40, dan *mean* (rata-rata) sebesar 36.19 dengan standar deviasi sebesar 2.84.

Adapun hasil data deskriptif berdasarkan item pertanyaan yaitu sebagai berikut:

Item Pernyataan	Frekuensi Dan Persentase					Kategori Dominant
	SS	S	KS	TS	STS	
Item 1	61	22	17	0	0	Sangat Setuju
Item 2	69	25	6	0	0	Sangat Setuju
Item 3	69	22	6	3	0	Sangat Setuju
Item 4	69	14	17	0	0	Sangat Setuju
Item 5	64	11	22	3	0	Sangat Setuju
Item 6	69	11	19	0	0	Sangat Setuju
Item 7	61	11	19	8	0	Sangat Setuju
Item 8	89	11	0	0	0	Sangat Setuju

Data diatas menjelaskan bahwa:

1. Item 1 menunjukkan bahwa responden (61%) sangat setuju, 22% setuju, 17% kurang setuju, dan tidak ada yang tidak setuju atau sangat tidak setuju terhadap pernyataan pada item ini.
2. Item 2 menunjukkan bahwa 69% responden sangat setuju, 25% setuju, 6% kurang setuju, dan tidak ada yang tidak setuju atau sangat tidak setuju terhadap pernyataan pada item ini.
3. Item 3 menunjukkan bahwa 69% responden sangat setuju, 22% setuju, 6% kurang setuju, dan 3% tidak setuju terhadap pernyataan pada item ini.
4. Item 4 menunjukkan bahwa 69% responden sangat setuju, 14% setuju, 17% kurang setuju, dan tidak ada yang tidak setuju atau sangat tidak setuju

terhadap pernyataan pada item ini.

5. Item 5 menunjukkan bahwa 64% responden sangat setuju, 11% setuju, 22% kurang setuju, dan 3% tidak setuju terhadap pernyataan pada item ini.
6. Item 6 menunjukkan bahwa 69% responden sangat setuju, 11% setuju, 19% kurang setuju, dan tidak ada yang tidak setuju atau sangat tidak setuju terhadap pernyataan pada item ini.

B. Pengujian Prasyarat (Uji Prasyarat)

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah proses statistik yang digunakan untuk menguji apakah data yang diberikan berasal dari distribusi normal atau tidak. Berikut hasil uji normalitas:

Tabel 4.7 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	104.00
	Std. Deviation	2.653716530
Most Extreme Differences	Absolute	.2123
	Positive	.054
	Negative	.321
Test Statistic		.326
Asymp. Sig. (2-tailed)		.332

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Olah Data SPSS Versi 24

Berdasarkan penjelasan dasar pengukuran bahwa:

Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 = data berdistribusi normal

Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05 = data tidak berdistribusi normal

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas ditemukan bahwa nilai Asymp.

Sig. (2-tailed) sebesar $0,332 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi secara normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah sebuah tes dalam analisis regresi yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi. Uji heteroskedastisitas berguna dalam beberapa situasi, seperti dalam analisis regresi linear, di mana diasumsikan bahwa hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah heteroskedastisitas

Tabel 4.8 Uji heteroskedastisitas

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Standart_akun atnsi*	Between	(Combined)	58.231	16	7.5434	.546	.567
	Groups		14.543	2	134.432	1.870	.657
Laporan_keua ngan*		Deviation	48.323	18	4.654	.954	.235
	Within	Groups	324.281	18	6.547		
	Total			36			

Sumber : Olah Data SPSS Versi 24

Dasar pengambilan keputusannya dalam uji adalah :

Jika nilai *Deviation from Linearity Sig.* $> 0,05$ = tidak ada heteroskedastisitas

Jika nilai *Deviation from Linearity Sig.* $< 0,05$ = Terdapat heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel hasil uji di atas menunjukkan bahwa nilai yaitu 0,235.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai *Deviation from Linearity Sig.* $>$

$0.235 > 0,05$ yang artinya tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi

sehingga tidak terdapat kesalahan penafsiran dalam pengujian hipotesis

selanjutnya.

C. Pengujian Hipotesis

1. Uji Regresi Linier Sederhana

Regresi linear sederhana digunakan untuk memprediksi atau menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikansi tidak lebih dari 5% atau 0,05, maka variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Hasil analisis regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	187,050	1	159,050	22,351	,000^b
	Residual	213,250	35	7,116		
	Total	410,300	36			

Sumber : Olah Data SPSS Versi 24

Data diatas diketahui bahwa nilai F hitung sebesar **22,351** dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel bebas atau dengan kata lain ada pengaruh yang signifikan antara variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah (X) terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y).

2. Uji Parsial (Uji T)

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat. Jika nilai t hitung $>$ t tabel untuk $\alpha = 5\%$, maka H_0 diterima. Untuk mencari t tabel = $(\alpha/2 ; 36 - 1 = 35)$, sehingga t tabel = 1.690.

Hasil analisis uji parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	15,794	7,399		2,134	,017
Standar_akuntansi*	.897	.190	.666	4,728	,000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Olah Data SPSS Versi 24

Data di atas diketahui nilai t hitung variabel standar akuntansi adalah sebesar 4,728. Karena nilai t hitung sebesar $4,728 > 1.690$ maka dapat disimpulkan bahwa H1 atau hipotesis pertama diterima. Artinya Standard Akuntansi (X) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik standart akuntansi yang dilakukan maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin meningkat.

Uji regresi linear sederhana juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kekuatan hubungan antara variabel independen dan dependen.

$$\hat{Y} = a + bX$$

$$\hat{Y} = 15,794 + 0,897$$

- a. Nilai konstanta sebesar 15,794 mengindikasikan bahwa jika variabel independen (penerapan standar akuntansi) adalah 0, maka kualitas laporan keuangan akan terjadi sebesar 15,794.

- b. Koefisien regresi variabel standar akuntansi (X) sebesar 0,897 mengindikasikan bahwa setiap terjadi peningkatan kualitas standar akuntansi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,897.

3. Uji Koefisien Determinasi

Pengujian selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor Kementerian Agama Parepare. Dalam penelitian ini menggunakan nilai adjusted R Square untuk mengetahui nilai R^2 . Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa besar. Dari hasil uji koefisien determinasi diperoleh hasil sebagai berikut:

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,666 ^a	,444	,424	2,668

Predictors: (Constant), Standar Akuntansi Pemerintah

Sumber : Olah Data SPSS Versi 24

Data tabel di atas tersebut bahwa diketahui nilai koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,444 atau 44,4%. Maka variabel standart akuntansi pemerintah (X) berpengaruh terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar 44,4%. Sedangkan sisanya 55,6% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4. Uji One Sample *T* Test

Pengujian pada hipotesis kedua yaitu pengujian pada seberapa baik standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare. Adapun pengujian yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

<i>One-Sample Test</i>						
	Test Value = 75					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Standar_akuntansi*	46.460	36	.000	-27.223	-27.78	-26.66

Sumber : Olah Data SPSS Versi 24

Data hasil pengujian diketahui bahwa nilai *t* hitung sebesar jika dibandingkan dengan nilai *t* tabel dengan $dk = n - 1 = (36 - 1 = 35)$ dengan taraf signifikan $\alpha = 5\%$ (0.05) diperoleh nilai *t* tabel sebesar 1.690. Nilai *t* hitung (46.460) > *t* tabel (1.690), maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah lebih besar dari 75% dapat diterima dengan perhitungan sampel ditemukan kualitas laporan keuangan yaitu lebih besar dari yang dihipotesiskan (μ_0) yaitu cukup baik.

D. Pembahasan Penelitian

1. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.

Pembahasan penelitian ini mendeskripsikan bahwa standard Akuntansi (X) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) yang

menjelaskan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor Kementerian Agama kota Parepare. Interpretasi penelitian ini menjelaskan bahwa semakin baik standart kauntansi yang dilakukan maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin meningkat.

Pembahasan penelitian ini merujuk pada hasil penelitian terkait dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare melalui beberapa tahapan pengujian yaitu uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal. Hasil uji menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,332, yang lebih besar dari 0,05, menandakan bahwa data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi dasar analisis regresi. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi adanya ketidaksesuaian varian residual dalam model regresi. Dengan nilai Deviation from Linearity Sig. sebesar 0,235 yang lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas, sehingga model regresi dapat digunakan secara tepat.

Uji regresi linear sederhana menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 22,351 dengan signifikansi 0,000, yang kurang dari 0,05, mengindikasikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Uji parsial (uji t) memperlihatkan nilai t hitung sebesar 4,728, lebih besar dari t tabel sebesar 1,690, mengindikasikan bahwa standar akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai

sebesar 0,444, artinya variabel standar akuntansi pemerintah menjelaskan 44,4% variabilitas kualitas laporan keuangan, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Uji One Sample T Test menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 46,460 melebihi t tabel sebesar 1,690, sehingga H_0 ditolak dan H_2 diterima, mengkonfirmasi bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah melebihi 75% dari nilai yang dihipotesiskan, yang berarti kualitas laporan keuangan dalam penelitian ini tergolong cukup baik. Dengan demikian, hasil penelitian ini secara keseluruhan menguatkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang tepat memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kantor Kementerian Agama Kota Parepare. Standar akuntansi pemerintahan mengatur bagaimana pemerintah mengelola dan melaporkan keuangan mereka secara transparan dan konsisten, sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Penggunaan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan prinsip basis akuntansi memastikan bahwa transaksi keuangan direkam berdasarkan saat uang diterima atau dibayarkan. Hal ini memberikan gambaran yang jelas tentang arus kas aktual yang dimiliki pemerintah, memfasilitasi pengendalian anggaran yang lebih efektif dan akurat. Di sisi lain, penggunaan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang posisi keuangan sebenarnya. Dengan mencatat aset

berdasarkan biaya perolehan atau nilai pertukaran saat diperoleh, dan kewajiban berdasarkan nilai nominal pada saat timbulnya, laporan keuangan menjadi lebih akurat dan mencerminkan nilai sebenarnya dari sumber daya yang dimiliki dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Prinsip-prinsip seperti substansi atas bentuk formal juga memastikan bahwa transaksi dan peristiwa dicatat berdasarkan esensi ekonomi yang mendasarinya, bukan hanya berdasarkan aspek formalnya. Penjelasan tersebut membantu menghindari manipulasi laporan keuangan yang bisa merugikan kepentingan publik.

Prinsip konsistensi dan pengungkapan lengkap memastikan bahwa perlakuan akuntansi yang sama diterapkan secara konsisten dari periode ke periode, dengan semua informasi yang relevan dan penting disajikan secara transparan. Ini memberikan kepercayaan kepada pengguna laporan keuangan, baik internal maupun eksternal, dalam membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang tersedia.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan secara konsisten dan tepat, Kantor Kementerian Agama Kota Parepare dapat meningkatkan kualitas laporan keuangannya, memberikan informasi yang lebih akurat, transparan, dan dapat dipercaya kepada semua pemangku kepentingan. Penjelasan tersebut tidak hanya mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan sumber daya publik.

Pembahasan penelitian ini dikaitkan dengan teori Entitas menekankan bahwa organisasi atau entitas ekonomi dianggap sebagai entitas yang berdiri

sendiri, terpisah dari pemiliknya, dan bertanggung jawab secara mandiri.⁷² Dalam konteks ini, organisasi memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang diamanatkan kepadanya. Teori Entitas dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare berfungsi untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun mencerminkan keadaan ekonomi yang sebenarnya. Standar akuntansi berfungsi sebagai panduan untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan dengan cara yang konsisten dan transparan.⁷³ Hal ini sejalan dengan prinsip teori yang menyatakan bahwa laporan keuangan adalah media pertanggungjawaban dan penilaian atas pengelolaan sumber daya.

2. Seberapa baik standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.

Kualitas standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare. Standar akuntansi pemerintahan dinilai baik dan memiliki dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kantor Kementerian Agama Kota Parepare dengan beberapa aspek evaluasi yang relevan. *Pertama*, keandalan laporan keuangan dipastikan dengan memastikan bahwa informasi yang disajikan adalah akurat dan memenuhi kebutuhan para pengguna, serta tidak memihak pada kepentingan pihak tertentu. Ini menjamin bahwa setiap transaksi dan peristiwa tercermin secara jujur dan bebas dari kesalahan material yang bisa menyesatkan.

⁷² Anis Chariri and Imam Ghozali, 'Teori Akuntansi', *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*, 409 (2007).

⁷³ Philip D Palmer, 'Audit Quality and Financial Report Disclosure', *Flinders Business School Research Paper Series*, 1 (2008), 1–29.

Kualitas standar akuntansi pemerintahan tercermin dalam kemampuan untuk membandingkan kinerja keuangan Kementerian Agama dengan standar atau benchmark industri yang relevan. Kemampuan untuk membandingkan ini tidak hanya membantu dalam menilai kinerja relatif, tetapi juga memperkuat transparansi laporan keuangan di mata pemangku kepentingan, seperti masyarakat umum atau lembaga donor.

Aspek lain dari evaluasi adalah keterpahaman informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Penjelasan yang jelas dan terperinci tentang kondisi keuangan Kementerian Agama membantu meningkatkan tingkat pemahaman para pemangku kepentingan, dari pegawai pemerintah hingga masyarakat luas. Hal ini memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik, memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan dengan baik tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, tetapi juga memperkuat integritas dan kepercayaan dalam pengelolaan sumber daya publik. Dengan memastikan informasi yang disajikan andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, pemerintah dapat memenuhi harapan untuk transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pelaporan keuangannya.

Standar akuntansi pemerintahan memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap kualitas laporan keuangan Kantor Kementerian Agama Kota Parepare melalui beberapa aspek kritis evaluasi. Keandalan laporan keuangan terjamin dengan baik, dimana setiap informasi yang disajikan dapat dipercaya karena memenuhi standar akuntansi yang ketat. Hal ini mencakup kepastian bahwa

transaksi dan peristiwa keuangan dicatat dengan akurat dan tidak berpihak pada pihak tertentu, sehingga menghindarkan kesalahan yang signifikan yang dapat menyesatkan pengambilan keputusan.

Laporan keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan standar atau benchmark industri yang relevan. Kemampuan ini tidak hanya membantu dalam mengevaluasi kinerja relatif Kantor Kementerian Agama, tetapi juga meningkatkan transparansi laporan keuangan di mata publik dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan membandingkan kinerja keuangan dengan entitas sejenis, keputusan dan kebijakan yang lebih baik dapat diambil untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.

Aspek terakhir dari evaluasi yang penting adalah kemampuan laporan keuangan untuk dipahami dengan baik oleh berbagai pemangku kepentingan. Penjelasan yang jelas dan komprehensif tentang kondisi keuangan memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak hanya dapat dipahami, tetapi juga dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan strategis.

Kualitas laporan keuangan Kantor Kementerian Agama Kota Parepare yang dikategorikan cukup baik, didukung oleh penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik. Hal ini tidak hanya meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik, tetapi juga memastikan integritas dan akuntabilitas yang diperlukan dalam menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik.

Pembahasan penelitian di atas dikaitkan dengan teori stakeholder bahwa pada kewajiban entitas untuk mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak

yang berpengaruh atau dipengaruhi oleh operasional mereka.⁷⁴ Dalam konteks ini, Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, sebagai entitas publik, perlu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas untuk memenuhi ekspektasi dan kebutuhan para stakeholder-nya, yang meliputi masyarakat umum, pegawai, anggota legislative. Teori Stakeholder juga menekankan pentingnya keterpahaman informasi. Penjelasan yang jelas dan terperinci tentang kondisi keuangan memungkinkan para pemangku kepentingan, dari pegawai pemerintah hingga masyarakat luas, untuk memahami laporan keuangan dengan baik. Hal ini mendukung transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan dapat digunakan secara efektif untuk pengambilan keputusan strategis.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare menunjukkan kualitas laporan keuangan yang memadai, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Teori Stakeholder. Laporan keuangan yang andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami mendukung transparansi dan akuntabilitas yang diperlukan untuk memenuhi kepentingan semua pemangku kepentingan.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fatmwati menjelaskan bahwa implementasi SAP secara signifikan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Ini sejalan dengan penjelasan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare berkontribusi pada peningkatan keandalan, transparansi, dan akurasi laporan keuangan. Kedua studi menunjukkan bahwa penerapan SAP yang baik

⁷⁴ Emerson Wagner Mainardes, Helena Alves, and Mario Raposo, 'Stakeholder Theory: Issues to Resolve', *Management Decision*, 49.2 (2011), 226–52.

adalah kunci untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.⁷⁵ Penelitian Fatmawati menekankan bahwa kompetensi SDM adalah variabel dominan yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal ini juga relevan dengan penjelasan sebelumnya yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia dalam proses pembuatan laporan keuangan mempengaruhi kualitas laporan. Kantor Kementerian Agama Kota Parepare memerlukan SDM yang kompeten untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan berkualitas, sejalan dengan temuan Fatmawati bahwa kompetensi SDM memiliki dampak signifikan.

Relevansi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh fatmawati dan penjelasan mengenai Kantor Kementerian Agama Kota Parepare menunjukkan keselarasan dalam hal pentingnya implementasi SAP, kompetensi SDM, dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Kedua studi menekankan bahwa ketiga faktor ini memiliki pengaruh signifikan, baik secara parsial maupun simultan, dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

⁷⁵ Fatmawati Fatmawati, 'Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kabupaten Bulukumba' (STIE Nobel Indonesia, 2020).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan penelitian ini yaitu:

1. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare dengan nilai significant sebesar $0.000 < 0.005$ sehingga hipotesis (H_1) diterima yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama kota Parepare.
2. Standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare dikategorikan cukup baik dengan nilai $t_{hitung} 46.460 > t_{tabel} 1.690$ maka H_2 diterima yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah lebih besar dari 75% dapat diterima dengan kualitas laporan keuangan lebih besar dari yang dihipotesiskan (μ_0) dengan kategori cukup baik.

B. Saran

1. Kepada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare. Disarankan untuk tetap mempertahankan penerapan standar akuntansi pemerintahan dengan baik dan melakukan pengembangan kualitas laporan.
2. Kepada Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian pengembangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Siti, Fadli Fadli, and Baihaqi Baihaqi, 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Dan Peran Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah', *Jurnal Fairness*, 8.2 (2021), 141–52 <<https://doi.org/10.33369/fairness.v8i2.15203>>
- Ahsani, Irvan, 'Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pengendalian Internal Serta Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pada SKPD Di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Teng)', 2015
- Almasdi Syahza, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (UR Press Pekanbaru, 2021)
- Ansar, Satriani Binti, 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar', *Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2018
- Aprsiansyah, Harry, Sri Rahayu, and Misni Erwati, 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo', *Jambi Accounting Review (JAR)*, 1.1 (2020), 44–62
- Arif, Muhammad Faisal, Anwar, Wijayanti Nanda Ayu, *Akuntansi Keuangan Menengah 2 Berbasis PSAK* (Jakarta: Salemba Empat, 2021)
- Arikunto, Suharsimi, 'Metodelogi Penelitian', *Yogyakarta: Bina Aksara*, 2006
- Ariyanto, Sanusi, 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2018', *Valuta*, 6.1 (2020), 41–54
- Arza, Oktriana, Yulia Syafitri, and Delori Nancy Meyla, 'Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Padang Panjang', *Pareso Jurnal*, 3.3 (2021), 519–42
- Bintoro dan Daryanto, *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan* (Yogyakarta: Gava Media, 2017)
- Chariri, Anis, and Imam Ghozali, 'Teori Akuntansi', *Semarang: Badan Penerbit*

Universitas Diponegoro, 409 (2007)

Dadang Suwanda dan Hendri Santosa, *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Berpedoman Pada Sap Untuk Pemerintah Daerah* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2014)

Dahriansyah, Andri, 'Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun' (Universitas Islam Riau, 2019)

Dameria, Sinaga, *Buku Ajar Statistik Dasar* (Uki Press, 2014)

Dariana, Dariana, and Jonase Oktavia, 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan', *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 2.1 (2018), 77–105

Darma, Budi, *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R²)* (Guepedia, 2021)

Edriani, Devi, 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Sekretaris Dewan Kota Padang', *UNES Journal Of Social and Economics Research*, 2.1 (2017), 31–41

Fatmawati, Fatmawati, 'Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kabupaten Bulukumba' (STIE Nobel Indonesia, 2020)

Hadori, Asep Mulyadi, 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat' (SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI STAN – INDONESIA MANDIRI BANDUNG, 2022)

Halim, Abdul, and Muhammad Syam Kusufi, 'Akuntansi Sektor Publik', *Jakarta: Salemba Empat*, 2012

Hamid, Edison, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua', *PARAMETER*, 2.2 (2017)

Hamta, Firdaus, *Buku Bahan Ajar Metode Penelitian Akuntansi* (Deepublish: Yogyakarta., 2015, 2015)

- , ‘Metodologi Penelitian Akuntansi’, *Yogyakarta: Deepublish*, 2015
- Hardani, Dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020)
- Hartiyani, Siti Johanne, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang’ (POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA, 2017)
- Herawati, Tuti, and Defi Nopianti, ‘Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah’, *STAR*, 14.2 (2017), 32–45
- Hermawan, Alisha Ristanti, ‘Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Sumber Daya Manusiaterhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Periode 2017-2020’, *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2.2 (2022), 304–15
- IASB, FASB, ‘EXPOSURE DRAFT: Conceptual Framework for Financial Reporting: The Objective of Financial Re-Porting and Qualitative Characteristics and Constraints of Decision Useful Financial Reporting Information’, 2008
- Ikyarti, Tri, and Nila Aprila, ‘Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma’, *Jurnal Akuntansi*, 9.2 (2019), 131–40
- Janna, Nilda Miftahul, and H Herianto, ‘Konsep Uji Validitas Dan Reliabilitas Dengan Menggunakan SPSS’, 2021
- Jati, Budhi Purwantoro, ‘Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah’, *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 22.1 (2019), 1–14
- Khosakiyah, Eriza, Vhika Meiriasari, and Andini Utari Putri, ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Selatan’, *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*, 1.1 (2020), 11–22
- Luthfya, Ade, ‘Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi’ (UNIVERSITAS JAMBI,

2023)

- Mainardes, Emerson Wagner, Helena Alves, and Mario Raposo, 'Stakeholder Theory: Issues to Resolve', *Management Decision*, 49.2 (2011), 226–52
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru* (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2018)
- Marihot, Yudi, Sapta Sari, and Anis Endang, 'Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif', *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 1.1 (2022)
- Masyhuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian* (Jakarta: Revika Aditama, 2008)
- Maulana, Candra, 'PENGARUH KARAKTERISTIK, KOMPLEKSITAS PEMERINTAHAN DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)' (UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, 2015)
- Mawaddah, Romdlonah Za'imatul, 'Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, SPI, Kompetensi Staf Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada OPD Kabupaten Pati)' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022)
<https://repository.unissula.ac.id/27869/2/31401800154_fullpdf.pdf>
- Munira, Hari, 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Dpkad) Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah' (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan' (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN, 2021)
- Musaropah, Siti, 'ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PP 71 TAHUN 2010 PADA BPKAD KABUPATEN KUNINGAN' (S1 Akuntansi Syariah IAIN Syekh Nurjati, 2023)
- Niagawan, Komang Adhi Rivan, Ni Putu Yeni Yuliantari, and Ni Putu Trisna Windika Pratiwi, 'Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, Dan Kualitas Teknologi Informasi Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua', *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1.2 (2020), 130–59
- Ningrum, Widya Mutiara, 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

- Daerah (Studi Empiris Pada Opd Di Kota Dan Kabupaten Magelang)' (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019)
- Ningtyas, Pravitasari Eka, and Dini Widyawati, 'Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4.1 (2015)
- Nopianti, Miranda, 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada SKPD Kota Bandung)' (Universitas Komputer Indonesia, 2019)
- Palmer, Philip D, 'Audit Quality and Financial Report Disclosure', *Flinders Business School Research Paper Series*, 1 (2008), 1–29
- Pattiasina, Victor, and Muhamad Yamin Noch, 'Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Ditinjau Dari Sisi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern', *AccJu-Accounting Journal*, 1.01 (2019), 18–28
- Purnamawati, I Gusti Ayu, and Saarce Elsy Hatane, 'Corporate Risks and The Impact on Earnings Management', *Jurnal Akuntansi*, 13.2 (2022) <<https://doi.org/10.26740/jaj.v13n2.p159-172>>
- Purwanti, Nurcahyani, 'Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris SKPD Kabupaten Klaten)' (Universitas Widya Dharma Klaten, 2020)
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, ed. by Syahrani, *Antasari Press*, I (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011)
- Ratna Wijayanti Daniar Paramita, Dkk., *Metode Penelitian Kuantitatif: Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa Akuntansi & Manajemen* (Jawa Timur: Widya Gama Press, 2021)
- Rosana, Lina, and Risma Wira Bharata, 'Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan', *Jurnalku*, 3.1 (2023), 23–34
- Rosyadi, Alfiani Athma Putri, *Statistika Pendidikan* (Malang: UMM Press, 2018)
- Roviyantie, Devi, 'Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

- Daerah', *Universitas Siliwangi*, 2011
- Rusmana Oman , Setyaningrum Dyah, Yuliansyah, Maryani, *Akuntansi Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2017)
- Safitri, Devi, 'Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (Studi Pada Skpd Pemerintah Kabupaten Bengkalis)', *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 5.2 (2017), 174–89
- Sari, Rizki Puspita, 'Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Dalam Laporan Keuangan Tahunan Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih', 2018, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) DAL
- Siska, 'Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan', 2017
- 'Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua'
<<https://kalbar.bpk.go.id/standar-akuntansi-pemerintahan-sap-berbasis-akrua/>>
- Subhi, Galan Nur, and Indrawati Yuhertiana, 'Peran SDM Dan Teknologi Informasi Pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua', *Equity*, 24.2 (2021), 141–56
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 19th edn (Bandung: Alfabeta, CV, 2013)
- Sukendra, I Komang, and I Atmaja, 'Instrumen Penelitian', 2020
- Suwardjono, Teori Akuntansi, 'Perekayasaan Pelaporan Keuangan', *Yogyakarta: Bpfe*, 2005
- Taman, Putriasri Pujanira dan Abdullah, 'Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy', *Jurnal Nominal, Volume*, Volume VI (2017)
- Yadiati Winwin, *Teori Akuntansi Suatu Pengantar* (Jakarta: Predana Media Group, 2010)
- Yunita, Tengku Asri, Amries Rusli Tanjung, and Lila Anggraini, 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Dan

Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Kota Dumai)' (Riau University, 2015)





LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3543/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

15 Juli 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: SASKIA AULIYAH YUSRI
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 07 Juni 2002
NIM	: 2020203862202047
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syari'ah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: JL. ABDUL RASYID, KELURAHAN LUMPUE, KECAMATAN BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

SRN IP0000608



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 608/IP/DPM-PTSP/7/2024

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA NAMA : **SASKIA AULYAH YUSRI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

ALAMAT : **JL. ABD. RASYID NO. 16 PAREPARE**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **18 Juli 2024 s.d 18 Agustus 2024**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **18 Juli 2024**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
 Pembina Tk. 1 (IV/b)
 NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37 Parepare
Telepon (0421)21133; Faximile (0421) 24996
Email : kotaparepare@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang Bertandatangan di bawah ini Pejabat Pembuat Komitmen, menerangkan bahwa :

Nama : SASKIA AULIYAH YUSRI
NIM : 2020203862202047
Universitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Jurusan : AKUNTANSI SYARIAH
Judul : PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Skripsi : TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE

Yang bersangkutan sedang melakukan penelitian di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare pada .17 Juni 2024 sampai 17 Juli 2024

Demikian surat Keterangan ini diberikan agar dapat di gunakan sebagaimana , mestinya.

17 Juli 2024
Pejabat Pembuat Komitmen

REFANDI WAKMUR, SE
NIP. 197707162006041024

Nama Mahasiswa : Saskia Auliyah Yusri
Nim : 2020203862202047
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
Judul : Pengaruh Penerapan standar akuntansi
Pemerintahan terhadap kualitas laporan
keuangan pada kantor kementerian agama
parepare

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth.
Ibu/Saudara/i Di Tempat
Assalamualaikum Wr.Wb

Ibu/Bapak dalam rangka menyelesaikan karya (skripsi) pada Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare maka saya,

Nama : Saskia Auliyah Yusri

NIM : 2020203862202047

Judul : Pengaruh Penerapan standar akuntansi Pemerintahan terhadap
kualitas laporan keuangan pada kantor kementerian agama
parepare

Untuk membantu kelancaran penelitian ini, Saya memohon dengan hormat kesediaan Ibu/Bapak untuk mengisi kuesioner penelitian ini. Atas ketersediaan Ibu/Bapak untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner ini, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :

2. Alamat :

3. Jenis Kelamin :

Pria Wanita

c. Pendidikan :

SMA S1

D2 S2

D3 S3

d. Umur

20>25

26>35

36>45

46>55

56>

e. Lama Bekerja :

< 1 Tahun 1-3 Tahun

4-5 Tahun > 5 Tahun

f. PETUNJUK PENGISIAN

1. Pernyataan yang ada, mohon dibaca dan dipahami dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada pernyataan yang tidak terisi atau terlewat.

2. Berilah tanda checklist (√) pada jawaban pada kolom yang telah disediakan. Pilihlah jawaban yang sesuai pendapat atas pernyataan. Dengan Keterangan di bawah ini:

- STS : Sangat Tidak Setuju = 1
- TS : Tidak Setuju = 2
- KS : Kurang Setuju = 3
- S : Setuju = 4
- SS : Sangat Setuju = 5

3. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja.
 4. Terima Kasih atas partisipasi Anda.

A. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X)

No.	Indikator Variabel	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
Basis Akuntansi						
1.	Pemerintah menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan prinsip basis akuntansi yang ditetapkan.					
2.	Pemerintah menggunakan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca agar mencerminkan posisi					

	keuangan yang sebenarnya.					
Prinsip Nilai Historis						
3.	Aset berwujud yang dimiliki pemerintah dicatat sebesar biaya perolehan atau harga pertukaran pada saat aset tersebut diperoleh dari transaksi sebelumnya.					
4.	Kewajiban pemerintah dicatat sebesar nilai nominal yang tertera pada dokumen perikatan pada saat timbulnya kewajiban tersebut.					
Prinsip Realisasi						
5.	Pendapatan diakui dan dicatat oleh pemerintah pada saat terealisasi secara tunai dan telah menjadi hak secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
6.	Belanja diakui dan dicatat oleh pemerintah pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.					
Prinsip Substansi Bentuk Formal						

7.	Transaksi atau peristiwa lain yang terjadi dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi yang mendasarinya.					
8.	Bentuk formal dari transaksi atau peristiwa bukan menjadi pertimbangan utama dalam pencatatan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.					
Prinsip Periodisitas						
9.	Kegiatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah dibagi menjadi periode-periode waktu tertentu, seperti satu tahun anggaran.					
10.	Pembagian waktu ke dalam periode-periode tertentu bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan secara berkala dan teratur.					
Prinsip Konsistensi						
11.	Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan oleh pemerintah pada kejadian atau transaksi yang serupa dari periode ke periode berikutnya.					

12.	Apabila terjadi perubahan perlakuan akuntansi, pemerintah harus mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuangan beserta alasan dan dampaknya.					
Prinsip Pengungkapan Lengkap						
13.	Laporan keuangan pemerintah menyajikan semua informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan secara lengkap dan transparan.					
14.	Pemerintah tidak boleh menghilangkan pengungkapan informasi penting yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan.					
Prinsip Penyajian Wajar						
15.	Laporan keuangan pemerintah menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas suatu entitas pelaporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.					

16.	Penyajian wajar laporan keuangan merupakan pertimbangan utama dalam pelaporan keuangan pemerintah agar informasi yang disajikan dapat dipercaya.					
-----	--	--	--	--	--	--

B. Kualitas Laporan Keuangan (Y)

No.	Indikator Variabel	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
Relevan						
1.	Evaluasi yang relevan terhadap kinerja keuangan Kementerian Agama berkontribusi pada peningkatan transparansi dalam pelaporan.					
2.	Fokus evaluasi pada aspek-aspek yang penting bagi pemangku kepentingan membantu memperjelas informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan.					
Andal						
3.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah benar dan memenuhi kebutuhan para pengguna dan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu sehingga teruji kebenarannya.					

4.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya sehingga bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material					
Dapat Dibandingkan						
5.	Evaluasi yang dapat dibandingkan dengan standar atau benchmark industri membantu membandingkan kinerja keuangan Kementerian Agama dengan entitas sejenis					
6.	Ketersediaan perbandingan yang jelas memperkuat transparansi laporan keuangan Kementerian Agama di mata pemangku kepentingan					
Dapat Dipahami						
7.	Laporan evaluasi yang disusun dengan baik memastikan informasi keuangan Kementerian Agama dapat dipahami dengan baik oleh pemangku kepentingan					
8.	Penjelasan yang jelas dan terperinci dalam laporan evaluasi membantu meningkatkan tingkat pemahaman tentang kondisi keuangan Kementerian Agama					

TABEL OUTPUT SPSS

Responden	HASIL KUJESIONER VARIABEL X																TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80
3	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	69
4	5	5	3	5	5	3	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	74
5	5	5	3	5	5	3	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	74
6	5	5	4	5	5	4	5	5	3	4	4	4	4	4	5	5	71
7	5	5	5	4	5	5	5	5	4	3	5	5	3	5	4	4	72
8	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	76
9	4	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	76
10	5	5	2	5	5	2	3	5	4	4	4	4	4	5	5	5	67
11	5	5	3	5	5	5	3	5	3	5	5	3	5	4	4	5	70
12	5	4	5	4	4	4	4	5	3	5	5	3	5	5	3	4	68
13	5	5	2	5	3	2	5	4	4	5	5	4	5	5	3	3	65
14	5	5	5	5	3	5	3	5	5	4	5	5	5	5	4	3	72
15	5	5	3	5	4	5	5	5	3	4	4	4	4	4	5	4	69
16	5	5	5	5	5	4	5	5	5	3	5	3	5	3	5	5	73
17	5	5	2	5	3	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	3	71
18	4	5	5	5	5	4	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	76
19	5	5	5	5	5	4	3	5	5	4	4	4	4	5	3	5	71
20	5	5	3	5	3	4	5	5	3	5	5	3	5	4	5	3	68
21	5	4	2	4	2	5	3	2	2	5	2	3	5	2	3	2	51
22	5	5	5	5	3	4	5	4	3	5	5	4	5	5	5	3	71
23	5	5	5	5	5	5	3	5	5	4	5	5	5	5	3	5	75
24	5	5	5	5	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	3	74
25	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	4	5	3	5	74
26	5	5	3	5	3	5	3	5	5	5	5	4	3	5	5	3	70
27	5	5	4	5	5	4	3	5	3	5	5	5	3	5	5	5	72
28	5	5	5	5	5	4	5	5	3	4	4	4	4	5	4	5	72
29	5	5	3	5	5	4	3	5	5	3	5	5	5	4	3	4	69
30	5	5	5	4	3	4	5	5	5	5	3	5	3	5	5	4	71
31	5	5	4	5	5	5	3	5	3	5	5	4	5	5	5	5	74
32	5	5	3	5	3	4	5	4	3	4	5	5	5	5	4	5	70
33	5	5	4	5	5	5	3	5	5	5	5	4	5	5	5	5	76
34	5	5	4	5	3	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	76
35	5	5	3	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	3	5	74
36	4	5	4	4	3	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	4	72
JUMLAH	177	177	141	173	152	154	151	173	147	165	167	160	163	171	157	155	2583



Responden	HASIL KUESIONER VARIABEL Y								TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	5	5	5	5	5	5	5	5	40
2	5	5	5	5	5	5	5	5	40
3	4	4	5	5	5	5	5	5	38
4	3	5	4	4	5	5	5	5	36
5	3	5	5	5	5	5	5	4	37
6	4	5	5	5	5	5	5	5	39
7	5	4	4	4	5	5	4	5	36
8	3	5	3	5	4	4	3	5	32
9	5	4	5	5	5	3	5	5	37
10	4	5	5	5	5	5	5	5	39
11	5	4	4	5	5	5	5	5	38
12	3	5	5	5	5	5	5	5	38
13	5	5	5	5	5	5	5	5	40
14	5	4	4	5	5	5	5	4	37
15	3	5	5	5	5	5	5	5	38
16	5	5	5	5	5	5	5	5	40
17	3	4	4	5	5	5	5	5	36
18	5	3	5	4	4	4	4	5	34
19	4	5	5	5	3	5	3	5	35
20	4	5	5	5	5	5	5	5	39
21	5	4	5	5	5	5	5	4	38
22	5	5	4	4	5	4	5	5	37
23	4	5	5	3	4	3	4	5	33
24	5	5	5	3	3	3	3	5	32
25	5	5	5	4	3	4	3	5	34
26	4	4	4	5	4	5	4	5	35
27	5	3	5	3	5	3	5	5	34
28	5	5	5	5	3	5	3	5	36
29	5	5	5	5	5	5	5	5	40
30	4	4	5	3	5	3	5	5	34
31	5	5	4	5	3	5	3	5	35
32	5	5	2	3	2	3	2	5	27
33	5	5	5	5	3	5	3	5	36
34	5	5	5	3	5	3	5	4	35
35	5	5	3	5	3	5	2	5	33
36	5	5	5	5	3	5	2	5	35
JUMLAH	160	167	165	163	157	162	153	176	1303

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Standar Akuntansi Pemerintahan	36	51	80	71.75	4.87
Valid N (listwise)	36				

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Laporan Keuangan	36	27	40	36.19	2.84
Valid N (listwise)	36				

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	104.00
	Std. Deviation	2.653716530
Most Extreme Differences	Absolute	.2123
	Positive	.054
	Negative	.321
Test Statistic		.326
Asymp. Sig. (2-tailed)		.332

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Standart_akuntansi*	Between Groups	(Combined)	58.231	16	7.5434	.546	.567
	Within Groups		14.543	2	134.432	1.870	.657
Laporan_keuangan*	Between Groups	Deviation	48.323	18	4.654	.954	.235
	Within Groups		324.281	18	6.547		
Total				36			

\

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	187,050	1	159,050	22,351	,000^b
	Residual	213,250	35	7,116		
	Total	410,300	36			

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	15,794	7,399		2,134	,017
	Standar_akuntansi*	,897	,190	,666	4,728	,000

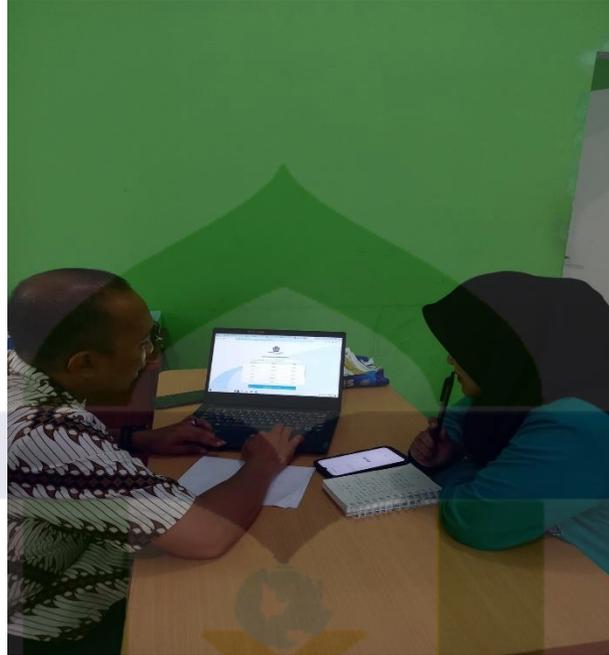
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,666 ^a	,444	,424	2,668

One-Sample Test						
	Test Value = 75					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Standar_akuntansi*	46.460	36	.000	-27.223	-27.78	-26.66

LAMPIRAN 8, T Tabel Untuk Alpha α 5% t

df	0,05	0,025	df	0,05	0,025	df	0,05	0,025	df	0,05	0,025
1	6.314	12.706	53	1.674	2.006	105	1.659	1.983	157	1.655	1.975
2	2.920	4.303	54	1.674	2.005	106	1.659	1.983	158	1.655	1.975
3	2.353	3.182	55	1.673	2.004	107	1.659	1.982	159	1.654	1.975
4	2.132	2.776	56	1.673	2.003	108	1.659	1.982	160	1.654	1.975
5	2.015	2.571	57	1.672	2.002	109	1.659	1.982	161	1.654	1.975
6	1.943	2.447	58	1.672	2.002	110	1.659	1.982	162	1.654	1.975
7	1.895	2.365	59	1.671	2.001	111	1.659	1.982	163	1.654	1.975
8	1.860	2.306	60	1.671	2.000	112	1.659	1.981	164	1.654	1.975
9	1.833	2.262	61	1.670	2.000	113	1.658	1.981	165	1.654	1.974
10	1.812	2.228	62	1.670	1.999	114	1.658	1.981	166	1.654	1.974
11	1.796	2.201	63	1.669	1.998	115	1.658	1.981	167	1.654	1.974
12	1.782	2.179	64	1.669	1.998	116	1.658	1.981	168	1.654	1.974
13	1.771	2.160	65	1.669	1.997	117	1.658	1.980	169	1.654	1.974
14	1.761	2.145	66	1.668	1.997	118	1.658	1.980	170	1.654	1.974
15	1.753	2.131	67	1.668	1.996	119	1.658	1.980	171	1.654	1.974
16	1.746	2.120	68	1.668	1.995	120	1.658	1.980	172	1.654	1.974
17	1.740	2.110	69	1.667	1.995	121	1.658	1.980	173	1.654	1.974
18	1.734	2.101	70	1.667	1.994	122	1.657	1.980	174	1.654	1.974
19	1.729	2.093	71	1.667	1.995	123	1.657	1.979	175	1.654	1.974
20	1.725	2.086	72	1.666	1.993	124	1.657	1.979	176	1.654	1.974
21	1.721	2.080	73	1.666	1.993	125	1.657	1.979	177	1.654	1.973
22	1.717	2.074	74	1.666	1.993	126	1.657	1.979	178	1.653	1.973
23	1.714	2.069	75	1.665	1.992	127	1.657	1.979	179	1.653	1.973
24	1.711	2.064	76	1.665	1.992	128	1.657	1.979	180	1.653	1.973
25	1.708	2.060	77	1.665	1.991	129	1.657	1.979	181	1.653	1.973
26	1.706	2.056	78	1.665	1.991	130	1.657	1.978	182	1.653	1.973
27	1.703	2.052	79	1.664	1.990	131	1.657	1.978	183	1.654	1.973
28	1.701	2.048	80	1.664	1.990	132	1.656	1.978	184	1.653	1.973
29	1.699	2.045	81	1.664	1.990	133	1.656	1.978	185	1.653	1.973
30	1.697	2.042	82	1.664	1.989	134	1.656	1.978	186	1.653	1.973
31	1.696	2.040	83	1.663	1.989	135	1.656	1.978	187	1.653	1.973
32	1.694	2.037	84	1.663	1.989	136	1.656	1.978	188	1.653	1.973
33	1.692	2.035	85	1.663	1.988	137	1.656	1.977	189	1.654	1.973
34	1.691	2.032	86	1.663	1.988	138	1.656	1.977	190	1.653	1.973
35	1.690	2.030	87	1.663	1.988	139	1.656	1.977	191	1.653	1.972
36	1.688	2.028	88	1.662	1.987	140	1.656	1.977	192	1.653	1.972
37	1.687	2.026	89	1.662	1.987	141	1.656	1.977	193	1.653	1.972
38	1.686	2.024	90	1.662	1.987	142	1.656	1.977	194	1.653	1.972
39	1.685	2.023	91	1.662	1.986	143	1.656	1.977	195	1.654	1.972
40	1.684	2.021	92	1.662	1.986	144	1.656	1.977	196	1.653	1.972
41	1.683	2.020	93	1.661	1.986	145	1.655	1.976	197	1.653	1.972
42	1.682	2.018	94	1.661	1.986	146	1.655	1.976	198	1.653	1.972
43	1.681	2.017	95	1.661	1.985	147	1.655	1.976	199	1.653	1.972
44	1.680	2.015	96	1.661	1.985	148	1.655	1.976	200	1.653	1.972
45	1.679	2.014	97	1.661	1.985	149	1.655	1.976			
46	1.679	2.014	98	1.661	1.984	150	1.655	1.976			
47	1.678	2.013	99	1.660	1.984	151	1.655	1.976			
48	1.677	2.012	100	1.660	1.984	152	1.655	1.976			
49	1.677	2.011	101	1.660	1.984	153	1.655	1.976			
50	1.676	2.010	102	1.660	1.983	154	1.655	1.975			
51	1.675	2.008	103	1.660	1.983	155	1.655	1.975			
52	1.675	2.007	104	1.660	1.983	156	1.655	1.975			

DOKUMENTASI PENELITIAN



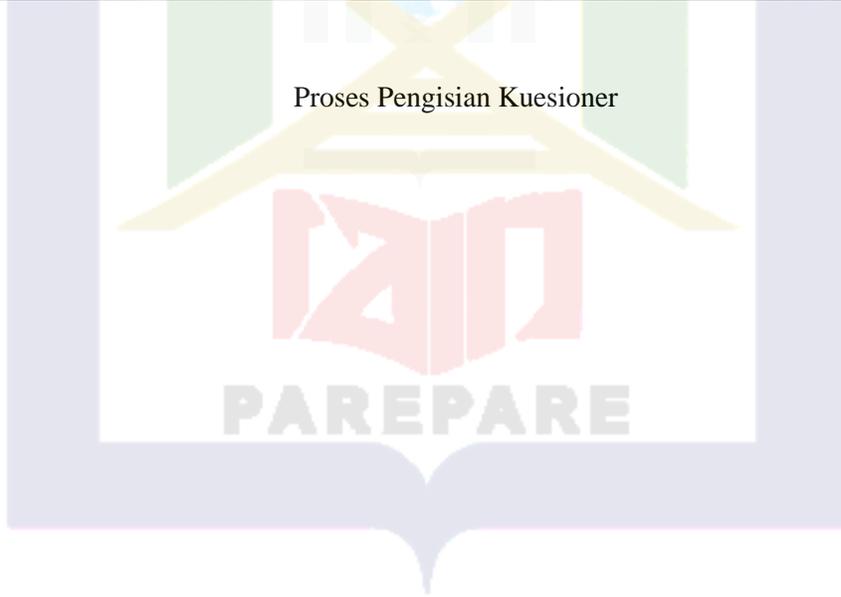
Proses Pengisian Kuesioner



Proses Pengisian Kuesioner



Proses Pengisian Kuesioner



BIODATA PENELITI



SASKIA AULIYAH YUSRI, lahir di Kota parepare, pada tanggal 07 Juni 2002. Anak kedua dari dua bersaudara yang lahir dari pasangan Yusri yunus dan Gusriani dollah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan di TK. pada tahun 2005 dan tamat pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD 28 kota parepare tahun 2009 sampai pada tahun 2014, kemudian Melanjutkan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 10 Parepare pada tahun 2014 sampai 2017, selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 kota parepare pada tahun 2017 sampai 2020 dan melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare pada tahun 2020 dengan mengambil program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa salo dua kecamatan maiwa kabupaten enrekang, kemudian melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan di IAIN Parepare, di tahun 2024 penulis menyelesaikan skripsinya dengan judul, *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.*